

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 8

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

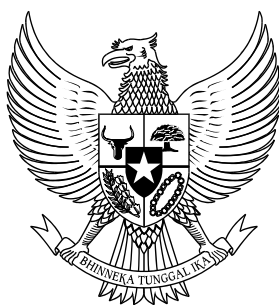
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 23);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 56);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Nomor 050/018/Bappeda/2021 tanggal 23 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 23) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah lima tahun mendatang.

f. BAB...

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

**SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka ini mempengaruhi juga terhadap Renstra yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya perubahan Renstra yang disesuaikan dengan RPJMD yang telah diubah.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dokumen Renstra memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas, badan, atau kantor dan perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Renstra yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Renja selama 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota.

Perubahan....

Perubahan Renstra dilakukan karena adanya Perubahan RPJMD Daerah Tahun 2018–2023 yang memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 point c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana non alam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional.

Pandemi Covid-19 yang muncul di akhir Tahun 2019 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global termasuk dalam hal penyesuaian anggaran, dan tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMD pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021. Demikian pula dengan penyesuaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Substansi Renstra yang mengalami perubahan meliputi gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini, permasalahan dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19, tujuan dan sasaran, target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 beserta indikator kerjanya untuk Tahun 2021-2023; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan proses penyusunan perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra

Tahap ini dilakukan dengan:

- a. membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan orientasi mengenai perubahan Rencana Strategis untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra;
- c. menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja; dan
- d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan isu-isu strategis yang meliputi identifikasi permasalahan, penelaahan visi misi dan program kepala daerah;

penelaahan...

penelaahan dokumen Renstra, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penelaahan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, asisten Administrasi, Kepala Bidang Pemerintahan Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kepala atau perwakilan dari masing-masing Bagian. Forum tersebut membahas tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator tujuan serta indikator sasaran Sekretariat Daerah pada tanggal 6 November 2020.
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra dengan berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD yang telah ditetapkan. Rancangan akhir Renstra disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan Sasaran;
 - V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - VIII. Penutup.
5. Penetapan Perubahan Renstra
Rancangan akhir Renstra disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Renstra adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan Covid-19 serta dampak yang di timbulkannya.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan pembangunan strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan Renja yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan naskah Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV...

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) subbagian kerja sama dan administrasi pemerintahan;
 - 2) subbagian administrasi kewilayahan; dan
 - 3) subbagian otonomi daerah.
 - b. Bagian Hukum, membawahkan:
 - 1) subbagian perundang-undangan;
 - 2) subbagian bantuan hukum; dan
 - 3) subbagian dokumentasi dan informasi hukum.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1) subbagian bina mental spiritual;
 - 2) subbagian kesejahteraan sosial; dan
 - 3) subbagian kesejahteraan masyarakat.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - 1) subbagian pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
 - 2) subbagian pengembangan dunia usaha; dan
 - 3) subbagian pengendalian dan distribusi perekonomian.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - 1) subbagian penyusunan program;
 - 2) subbagian pengendalian program; dan
 - 3) subbagian evaluasi dan pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - 1) subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - 2) subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - 3) subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

4. Asisten....

4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

a. Bagian Umum, membawahkan:

- 1) subbagian Keuangan;
- 2) subbagian rumah tangga; dan
- 3) subbagian perlengkapan.

b. Bagian organisasi, membawahkan:

- 1) subbagian kelembagaan dan analisis jabatan;
- 2) subbagian pelayanan publik dan tata laksana;
- 3) subbagian kinerja dan reformasi birokrasi.

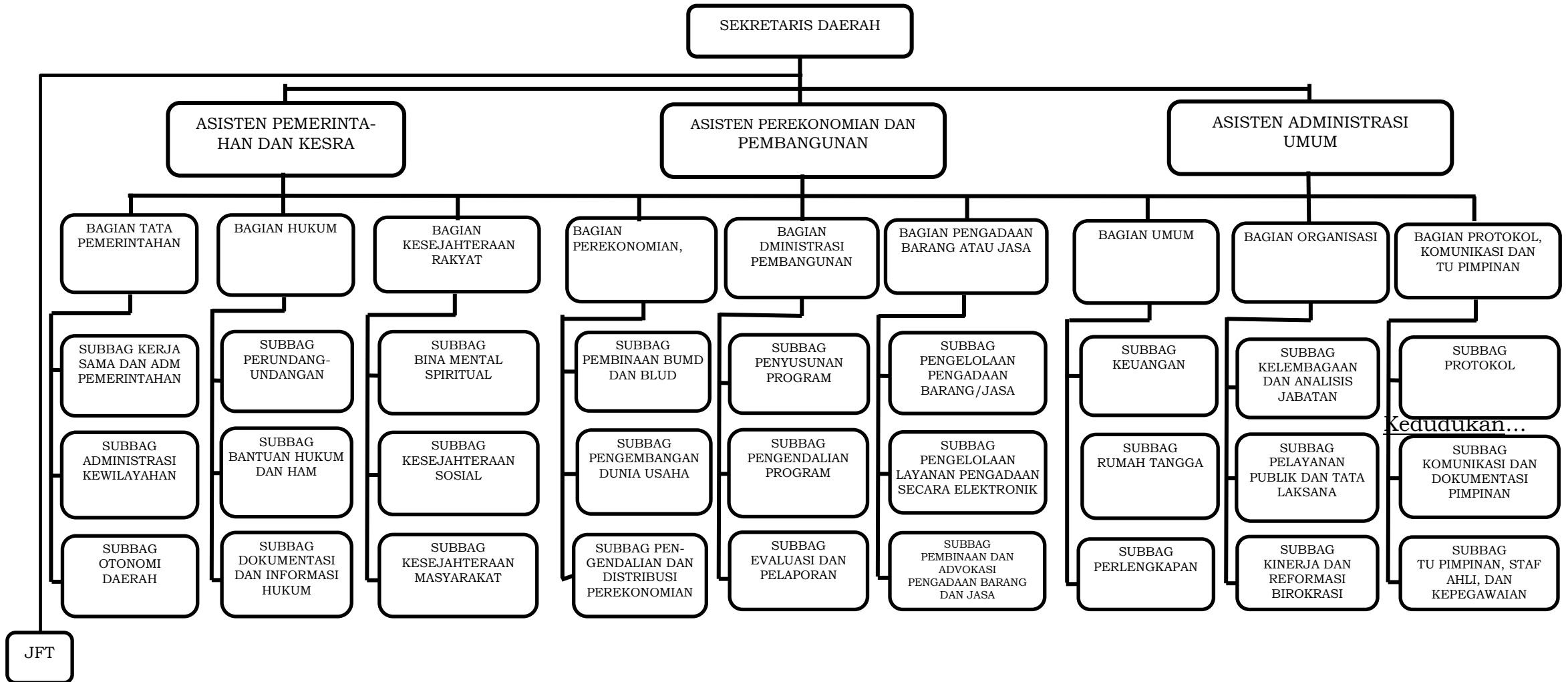
c. Bagian Protokol, Komunikasi, dan Tata Usaha Pimpinan, membawahkan:

- 1) subbagian protokol;
- 2) subbagian komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- 3) subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukabumi adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukabumi



Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sedangkan tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Perangkat Daerah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasi penyusunan program kerja Sekretariat Daerah berdasarkan rencana strategis dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan dan perekonomian, serta administrasi umum;
- b. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan dan perekonomian, serta administrasi umum lainnya;
- c. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. membina dan mengoordinasi kegiatan perangkat Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal;
- f. membina dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan dan perekonomian, serta administrasi umum lainnya;
- g. menerima dan melaksanakan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Wakil Wali Kota;
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Wali Kota dan seluruh perangkat Daerah;
- k. mempertanggungjawabkan tugas secara teknis operasional dan administratif kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Daerah membawahkan:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asda I;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I), mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam hal:

- 1) mengoordinasikan...

- 1) mengoordinasikan perumusan program kerja di lingkungan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menyusun kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- 3) mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- 7) menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- 8) melakukan pembinaan kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 9) melakukan koreksi, penyempurnaan, dan pamarafan atau penandatanganan naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- 10) mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan (Asda I) membawahkan:

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum; dan
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) dipimpin oleh seorang Asisten, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam hal:

- 1) mengoordinasikan perumusan program kerja di lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- 4) menyusun kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

6) melakukan...

- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- 7) melakukan pembinaan kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan;
- 8) melakukan koreksi, penyempurnaan, dan pamarafan atau penandatanganan naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- 9) mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) membawahkan:

- 1) Bagian perekonomian;
- 2) Bagian administrasi pembangunan; dan
- 3) Bagian pengadaan barang dan jasa.

c. Asisten Administrasi Umum (Asda III)

Asisten Administrasi Umum (Asda III) dipimpin oleh seorang Asisten, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam hal sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan perumusan program kerja di lingkungan asisten administrasi umum berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) melaksanakan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan);
- 3) menyusun kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang organisasi;
- 5) menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- 7) menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- 8) melakukan pembinaan kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan asisten administrasi umum;
- 9) mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- 10) mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan asisten administrasi umum secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinaan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam...

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi (Asda III) membawahkan:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Organisasi; dan
- 3) Bagian Protokol, Komunikasi, dan Tata Usaha Pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 adalah sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) orang. Komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

| No | Unit Kerja | PNS | Honor Daerah /TKK/THL | Jumlah |
|----|--|------------|-----------------------|------------|
| 1 | Sekretaris Daerah | 1 | | 1 |
| 2 | Staf Ahli | 2 | | 2 |
| 3 | Asisten I, II, III | 3 | | 3 |
| 4 | Bagian Pemerintahan | 7 | 4 | 11 |
| 5 | Bagian Hukum | 9 | 2 | 11 |
| 6 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 9 | 5 | 14 |
| | Bagian Perekonomian | 8 | 2 | 10 |
| 7 | Bagian Administrasi Pembangunan | 7 | 3 | 10 |
| 8 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 14 | 1 | 15 |
| 9 | Bagian Umum | 19 | 21 | 40 |
| 10 | Bagian Organisasi | 10 | 3 | 13 |
| 11 | Bagian Protokol, Komunikasi, dan Tata Usaha Pimpinan | 26 | 30 | 56 |
| | Jumlah | 115 | 71 | 186 |

2.2.2 Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah menurut status, pangkat dan golongan dapat digambarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2....

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

| No | Status Kepegawaian dan Pangkat/Gol | Gol/Ruang | Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|--|------------|-------|
| | | | Sekda | Asisten/Staf Ahli | Bag Pemerintahan | Bag. Hukum | Bag. Kesejahteraan Rakyat | Bag. Pengadaan Barang dan Jasa | Bag. Perekonomian | Bag. Adbang | Bag Umum | Bag Organisasi | Bag. Protokol, Komunikasi, dan Tata Usaha Pimpinan | Fungsional | Total |
| 1 | PNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Pembina Utama Madya | IV/d | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | • Pembina Utama Muda | IV/c | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| | • Pembina Tk. I | IV/b | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| | • Pembina | IV/a | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| | • Penata Tingkat I | III/d | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 13 |
| | • Penata | III/c | | | 2 | | 1 | 5 | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 20 |
| | • Penata Muda Tk I | III/b | | | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | | 7 | | 26 |
| | • Penata Muda | III/a | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 4 | 6 | | 16 |
| | • Pengatur Tk. I | II/d | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 6 | | 11 |
| | • Pengatur | II/c | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 6 |
| | • Pengatur Muda Tingkat I | II/b | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| | • Pengatur Muda | II/a | | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| | • Juru Tingkat I | I/d | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| | • Juru | I/c | | | | | | | | | | | | | |
| | • Juru Muda Tk I | I/b | | | | | | | | | | | | | |
| | • Juru Muda | I/a | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Honorar Daerah | - | | | | | | | | | | | | | |
| | • THL | | | | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3 | 30 | | 71 |
| | • TKS | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | 9 |
| | Total | | 1 | 5 | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 41 | 13 | 61 | | 195 |

2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai, status kepegawaian dan tingkat pendidikan dapat digambarkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3...

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| NO | Status Kepegawaian & Tingkat Pendidikan | Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|-------|
| | | Sekda | Asisten/Staf Ahli | Bag. Perintahan | Bag. Hukum | Bag. Kesejahteraan | Bag. Pengadaan Barjas | Bag. Perekonomian | Bag. Adbang | Bag. Perlengkapan Setda | Bag. Organisasi | Bag. Protokol | Fungsional | Total |
| 1 | PNS | | | | | | | | | | | | | |
| | • Strata 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | • Strata 2 | 1 | 5 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 32 |
| | • Strata 1 | | | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | | 60 |
| | • Diploma III/IV | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 4 |
| | • SMA/Sederajat | | | | 1 | 1 | | | | 12 | | 11 | | 25 |
| | • SMP/Sederajat | | | | | | | | | | | | | |
| | • SD/Sederajat | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Honoror Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | • Strata 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | • Strata 1 | | | 5 | | 4 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 18 | | 35 |
| | • Diploma III/IV | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
| | • SMA/Sederajat | | | | | | | | | 16 | | 9 | | 25 |
| | • SMP/Sederajat | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | • SD/Sederajat | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 1 | 5 | 11 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 41 | 13 | 56 | | 186 |

2.2.4 Perlengkapan

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlunya adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada Tabel 2.4 berikut ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi:

Tabel 2.4
Daftar Perlengkapan
Sumber Data : Bagian Umum, 2021

| No | Jenis Aset | Jumlah Nilai (Dalam Ribuan) |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | ASET TETAP | |
| 1. | Tanah | 24.444.161.954 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 26.356.955.024 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 18.436.763.737 |
| 4. | Jalan, Irigasi & Jaringan | - |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 2.053.634.593 |
| 6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | - |
| 7. | Akumulasi Penyusutan | (26.275.588.191) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 45.015.927.117 |
| | ASET LAINNYA | 1.328.913.076 |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 8. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - |
| 9. | Aset tidak Berwujud | 1.328.913.076 |
| 10. | Aset Lain-lain | - |
| | Jumlah Total | 46.344.840.194 |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 secara garis besar dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Semua program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Renstra dapat dicapai dengan baik. Semua kegiatan yang dilaksanakan bersifat penunjang Kepala Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan daerah dan pengoordinasian Perangkat Daerah. Untuk lebih rinci mengenai pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 subbab Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

2.3.2 Anggaran...

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Tabel 2.5 (T-C 23 a)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | - | - | - | 51,22 | 53,27 | 57,27 | 61,27 | 65,27 | - | 50,7 | 67,92 | 68,03 | N/A | - | 95,17 | 118,6 | 111 | - |
| 2 | Kategori Akuntabilitas Kinerja | - | - | - | B | BB | BB | A | A | B | BB | BB | BB | N/A | 100 | 100 | 100 | 75 | N/A |
| 3 | Persentase kenaikan ZIS | - | - | - | 22,30 | 23,94 | 25,58 | 27,22 | 29 | 20,57 | 24,74 | 21 | 70,11 | 98,42 | 92,24 | 103 | 82 | 257 | 339 |
| 4 | Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 62,00 | 72,00 | 80,00 | 63,10 | 24,00 | 88 | 96 | 100 | 74 | 26 |
| 5 | nilai rata-rata IKM | - | - | - | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| 6 | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 232,93 | 89,20 | 100 | 100 | 111 | 258 | 99 |
| 7 | Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru | - | - | - | - | 4,5 | 2,5 | - | 7 | - | 3,8 | 8,7 | - | N/A | - | 84 | 358 | - | - |

Tabel...

Tabel 2.6 (T-C 23 b)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------------|------|------------------------------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -16 | -17 |
| 1 | Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda | - | - | - | 80 | 85 | 90 | 95.9 | 96.2 | 80 | 80 | 100 | 95 |
| 2 | Nilai Evaluasi AKIP Kota Sukabumi Komponen Pelaporan Kinerja | - | - | - | 11.1 | 11.85 | 12.6 | - | - | 12.4 | - | 111 | - |
| 3 | Nilai hasil EKPPD | - | - | - | 3.4 | 3.42 | 3.44 | 3.46 | 3.48 | 3.4 | - | 100 | - |
| 4 | Persentase produk hukum yang harmonis | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan | - | - | - | 3.07 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.15 | 3.07 | 3,08 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase fasilitasi kerjasama daerah Pemerintah Kota Sukabumi | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | persentase capaian program | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Jumlah BUMD sesuai Good corporate governance | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Sukabumi | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | % Unit Pelayanan Publik yang memiliki Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 20 | 20 | 100 | 50 |
| 11 | Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan | - | - | - | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 79 | 79,5 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan dan perencanaan lingkup Sekretariat Daerah | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase Kualitas Layanan Barang dan Aset Daerah lingkup Sekretariat Daerah | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2.7...

Tabel 2.7 (T-C 24a)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|--------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 4,171,901,000 | 5,535,174,500 | 3.652.741.000 | 4,614,673,947 | 6,181,695,797 | 4,017,002,517 | 5,137,237,719 | 3.858.196.583 | 4,394,165,246 | 5,864,155,972 | 96,29 | 92,81 | 106,62 | 95,22 | 94,86 | 82% | 79% |
| 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 403,185,000 | 534,556,000 | 775,000,000 | 572,700,000 | 502,000,000 | 380,730,000 | 508,034,920 | 775,000,000 | 546,916,671 | 471,722,327 | 94,43 | 95,04 | 100 | 95,50 | 93,96 | 45% | 44% |
| 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota | 216,330,000 | 175,000,000 | - | - | 585,199,700 | 214,110,000 | 172,200,000 | - | - | 511,884,700 | 98,97 | 98,40 | - | - | 87,47 | 220% | 190% |
| 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 265,000,000 | 242,351,000 | 325,000,000 | 449,537,185 | - | 264,480,000 | 234,061,000 | 325,000,000 | 429,331,085 | - | 09,80 | 96,58 | 100 | 95,5 | - | 141% | 129% |
| 5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 664,715,000 | 1,190,573,600 | 1,025,000,000 | 691,900,000 | 991,900,000 | 640,386,000 | 1.142.284.100 | 1,025,000,000 | 616,023,944 | 912,987,986 | 96,34 | 95,94 | 100 | 89,03 | 92,04 | 83% | 74% |
| 6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 1,802,216,000 | 1,983,732,000 | 2,243,319,500 | 2,264,575,000 | 2,378,125,000 | 1,678,593,150 | 1.813.885.500 | 1.943.883.200 | 2,054,009,250 | 2,068,753,790 | 93,14 | 91,44 | 86,65 | 90,7 | 86,00 | 57% | 43% |
| 7. Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah | 1,760,000,000 | 1,073,000,000 | 978,000,000 | 1,102,550,000 | 1,118,470,000 | 1,065,728,500 | 727.299.335 | 830,937,917 | 771,435,509 | 1,021,261,850 | 60,66 | 67,78 | 84,96 | 69,96 | 91,30 | -87% | -8% |
| 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 4,227,638,000 | 1,519,460,000 | 2,006,159,900 | 1,230,661,900 | 1,723,994,250 | 1,135,521,644 | 1.313.047.448 | 1,781,838,137 | 1,106,758,871 | 1,426,505,843 | 26,86 | 86,42 | 88,82 | 89,93 | 82,74 | 164% | 47% |
| 9. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham | 110,000,000 | 85,000,000 | 128,920,000 | 218,428,000 | 184,000,000 | 105,630,000 | 54.870.000 | 122,524,050 | 113,344,800 | 163,122,800 | 96,03 | 64,55 | 95,03 | 94,55 | 88,65 | 108% | 91% |
| 10. Program Lingkungan Sosial (DBCHT) | 185,000,000 | 185,650,000 | - | 131,500,000 | 131,500,000 | 167,397,500 | 174.044.415 | - | 124,344,800 | 117,040,731 | 90,49 | 93,75 | - | 94,55 | 89,00 | 66% | 69% |

Tabel 2.8.....

Tabel 2.8 (T-C 24b)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi 2019-2023

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---|--------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -13 | -17 | -18 |
| 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan (P3) ajaran agama | Rp.2.054.898.300 | - | - | - | - | Rp.1.493.795.480 | | 72,69% | | - | - |
| PROGRAM PEMBINAAN, PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KEAGAMAAN | | | | | | | | | | | |
| Kajian Peraturan Pembinaan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Luhur dan Pengamalan Ajaran Agama | - | Rp.2,888,759,000 | Rp.1.786.821.900 | Rp.1.965.504.000 | Rp.1.965.504.000 | | 2,067,557,012 | | 71.57% | -91% | - |
| 2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Rp.1.455.998.300 | Rp 318,167,625 | Rp.195.773.840 | Rp. 271.348.000 | Rp.298.483.500 | Rp.1.388.317.861 | 312,839,000 | 95,35% | 98.33% | -27% | -52% |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Rp.191.850.000 | 734,197,775 | Rp.226.657.200 | Rp.249.322.900 | Rp. 274.255.200 | Rp.180.996.305 | 701,249,500 | 94,34% | 95.51% | 7% | 97% |
| 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | |
| Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 78,068,800 | Rp. 290.715.000 | Rp.330.000.000 | Rp.362.000.000 | Rp.397.000.000 | Rp.281.973.800 | 78,046,850 | 96,48% | 99.97% | 38% | -47% |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp.36. 250.000 | Rp.- | Rp.44.000.000 | Rp.48.000.000 | Rp.52.000.000 | Rp.28.910.000 | | 79,75% | - | 7% | -100% |
| Publikasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 72,220,500 | Rp.410.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.495.000.000 | Rp.545.000.000 | Rp.309.676.200 | 72,220,500 | 83,17% | 100% | 50% | -52% |
| Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan Daerah | Rp.31.100.000 | Rp.- | Rp.99.000.000 | Rp.108.000.000 | Rp.118.000.000 | Rp.4.006.000 | - | 12,88% | | 31% | - |
| Pemberian Advokasi Hukum | Rp.144.850.000 | Rp. 15,000,000 | Rp.150.000.000 | Rp.165.000.000 | Rp.182.000.000 | Rp.125.369.464 | 2,500,000 | 86,55% | 16.67% | 5% | -86% |
| Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Rp.277.170.000 | Rp. 34,468,000 | Rp.215.000.000 | Rp.236.000.000 | Rp.260.000.000 | Rp.259.195.100 | 30,466,500 | 93,51% | 88.39% | -1% | -66% |
| Penanganan Perkara Litigasi | Rp.47.300.000 | Rp 97,008,000 | Rp.82.000.000 | Rp.90.000.000 | Rp.99.000.000 | Rp.9.298.600 | 93,678,100 | 19,66% | 96.57% | 16% | 217% |
| Optimalisasi Peningkatan Wawasan Bidang Hukum | Rp. 107.515.000 | Rp. 10,859,000 | Rp.250.000.000 | Rp.275.000.000 | Rp.302.000.000 | Rp.96.018.450 | 10,859,000 | 89,31% | 100% | 23% | -66% |
| Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Rp.57.000.000 | Rp.- | Rp.69.000.000 | Rp.76.000.000 | Rp.83.000.000 | Rp.3.600.000 | - | 6,32% | | 8% | - |
| 4. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | | | | | |
| Optimalisasi/Pembentukan Kerjasama Antar Dalam Penyediaan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | |
| Pengendalian (Monev) Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Rp.166.310.000 | Rp. 60,072,450 | Rp.275.000.000 | Rp.300.000.000 | Rp.350.000.000 | Rp.156.372.189 | 60,072,410 | 94,02% | 100% | 16% | -38% |
| Koordinasi Peningkatan/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri | Rp.137.307.300 | Rp. 54,579,600 | Rp.190.000.000 | Rp.220.000.000 | Rp.250.000.000 | Rp.128.736.070 | 54,579,600 | 93,76% | 100% | 13% | 35% |
| | Rp.82.205.000 | Rp.- | Rp.150.000.000 | Rp.180.000.000 | Rp.200.000.000 | Rp.79.106.492 | - | 96,23% | | 19% | - |

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---|---------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -13 | -17 | -18 |
| Kerjasama Penjarangan Aspirasi Masyarakat utk Pelaksanaan Pembangunan | Rp.75.954.000 | Rp. 3,960,000 | Rp.125.000.000 | Rp.150.000.000 | Rp.175.000.000 | Rp.67.424.545 | 3,960,000 | 88,77% | 100% | 18% | -76% |
| 5. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | | | | | | | | | | | |
| Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Rp.131.000.000 | - | - | - | - | Rp.127.838.673 | | 97,59% | | - | - |
| Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan sektoral | Rp.30.000.000 | - | - | - | - | Rp.29.908.500 | | 99,70% | | - | - |
| 6.PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi pengadaan Barang dan Jasa | Rp.210.842.000 | Rp 73,371,000 | Rp.300.000.000 | Rp.325.000.000 | Rp.350.000.000 | Rp.185.771.133 | 71,875,501 | 88,11% | 97.96% | 11% | -38% |
| 7.PROGRAM PELAYANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Sanggah Pengadaan Barang/Jasa | Rp.23.122.000 | Rp. 513,000 | Rp.27.977.620 | Rp.30.775.382 | Rp.33.852.920 | Rp.11.608.104 | 513,000 | 50,20% | 100% | 8% | -79% |
| Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan | Rp.58.400.000 | Rp. 28,717,000 | Rp.136.125.000 | Rp.149.737.500 | Rp.164.711.250 | Rp.38.963.023 | 28,490,200 | 66,72% | 99.21% | 23% | -14% |
| 8.PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI BARANG/JASA | | | | | | | | | | | |
| Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa | Rp. 99,407,500 | Rp.158.559.500 | Rp.174.415.450 | Rp.191.856.995 | Rp.211.042.694 | Rp.83.668.305 | 99,407,500 | 57,88% | 100.00% | 16% | 9% |
| Konsolidasi RPP Pengadaan Barang/Jasa | Rp.221.605.000 | Rp. 67,862,950 | Rp.268.142.050 | Rp.294.956.255 | Rp.324.451.880 | Rp.200.910.301 | 67,862,950 | 90,66% | 100.00% | 8% | -42% |
| Klarifikasi Evaluasi dan Pembuktian Penawaran / Kualifikasi | Rp.78.250.000 | Rp. 30,296,000 | Rp.152.762.500 | Rp.168.038.750 | Rp.184.842.625 | Rp.72.181.324 | 30,287,435 | 92,24% | 99.97% | 19% | -35% |
| Penyusunan Juklak dan Juknis pengadaan barang dan jasa | Rp.148.244.600 | Rp. 60,193,000 | Rp.143.075.966 | Rp.157.383.562 | Rp.173.121.918 | Rp.137.873.970 | 56,488,300 | 93,00% | 93.85% | 3% | -36% |
| Pendampingan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Rp.78.300.000 | Rp. 1,130,000 | Rp.94.743.000 | Rp.104.217.300 | Rp.114.639.030 | Rp.58.111.867 | 1,130,000 | 74,22% | 100% | 8% | -86% |
| 9.PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur | Rp.36.200.000 | Rp.- | Rp.75.000.000 | Rp.80.000.000 | Rp.85.000.000 | Rp.30.918.600 | - | 85,41% | | 19% | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik | Rp.164.000.000 | Rp. 162,450,000 | Rp.70.000.000 | Rp.80.000.000 | Rp.90.000.000 | Rp.133.155.000 | 126,184,000 | 81,19% | 77.68% | -11% | -3% |
| 10.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan makanan dan minuman | Rp.1.890.900.000 | Rp.3.208,500,000 | Rp.1.172.500.000 | Rp.1.176.000.000 | Rp.1.179.500.000 | Rp.1.889.847.863 | 3,208,060,547 | 99,94% | 99.99% | -9% | 30% |
| Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi kepala Daerah | Rp.922.600.000 | Rp. 988,000,000 | Rp.390.000.000 | Rp.397.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.847.665.329 | 938,652,357 | 91,88% | 95.01% | -13% | 5% |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp.1.592.100.000 | Rp.1,820,000,000 | Rp.325.000.000 | Rp.350.500.000 | Rp.360.000.000 | Rp.1.576.975.674 | 1,819,978,626 | 99,05% | 100.00% | -26% | 7% |
| 11.PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi unsur MUSPIDA | Rp.1.158.270.000 | Rp.1,812,163,800 | Rp.340.000.000 | Rp.342.300.000 | Rp.345.700.000 | Rp.1.157.051.954 | 1,776,599,649 | 99,89% | 98.04% | -21% | 24% |
| Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan | Rp.887.800.000 | Rp.1,275,200,000 | Rp.415.000.000 | Rp.417.400.000 | Rp.420.000.000 | Rp.886.680.794 | 1,273,830,000 | 99,87% | 99.89% | -14% | 20% |
| Kegiatan pelaksanaan hari jadi kota/kab/prov. | Rp.778.125.000 | Rp. 460,466,200 | Rp.180.000.000 | Rp.183.000.000 | Rp.185.000.000 | Rp.774.752.800 | 460,466,200 | 99,57% | 100% | -25% | -23% |
| Kegiatan pelaksanaan hari besar nasional | Rp.959.205.000 | Rp. 792,555,000 | Rp.160.500.000 | Rp.165.500.000 | Rp.168.500.000 | Rp.955.612.000 | 790,950,000 | 99,63% | 99.80% | -29% | -9% |
| Optimalisasi pelayanan tamu pemerintah daerah | Rp.814.295.000 | Rp. 1,575,500,000 | Rp.313.550.000 | Rp.317.400.000 | Rp.320.000.000 | Rp. 813.750.256 | 1,537,480,309 | 99,93% | 97.59% | -17% | 37% |
| Koordinasi dan konsultasi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah | Rp. 157.140.000 | Rp. 235,890,000 | Rp.175.000.000 | Rp.180.000.000 | Rp.185.000.000 | Rp.154.950.720 | 235,845,000 | 98,61% | 99.98% | 3% | 23% |
| Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi kepala Daerah | Rp. 361.089.500 | Rp. 28,045,000 | Rp.390.000.000 | Rp.397.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.319.593.091 | 28,044,677 | 88,51% | 100.00% | 5% | -70% |

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---|--------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -13 | -17 | -18 |
| 12.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp.25.000.000 | Rp. 66,000,000 | Rp.22.000.000 | Rp.25.000.000 | Rp.27.000.000 | Rp.21.095.000 | 62,750,000 | 84,38% | 95.08% | 2% | 72% |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Rp.2.000.000 | Rp.- | Rp.2.420.000 | Rp.2.662.000 | Rp.2.928.000 | Rp.2.000.000 | - | 100% | | 8% | - |
| Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Rp.1.600.000 | Rp.- | Rp.1.936.000 | Rp.2.129.600 | Rp.2.342.560 | Rp.1.600.000 | - | 100% | | 8% | - |
| Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD | Rp.4.100.000 | Rp. 45,570,000 | Rp.4.961.000 | Rp.5.457.100 | Rp.6.002.810 | Rp.4.100.000 | 42,970,000 | 100% | 94.29% | 8% | 224% |
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Rp.3.000.000 | Rp. 10,625,000 | Rp.3.630.000 | Rp.3.993.000 | Rp.4.392.300 | Rp.3.000.000 | 10,245,000 | 100% | 96.42% | 8% | 85% |
| 13.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rp.1.768.340.000 | Rp. 2,210,275,000 | Rp.1.616.257.500 | Rp.1.777.883.250 | Rp.1.955.671.575 | Rp.1.570.547.905 | 2,156,431,719 | 88,81% | 97.56% | 2% | 17% |
| penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 616.750.000 | Rp. 653,660,104 | Rp.911.500.000 | Rp.920.000.000 | Rp.950.000.000 | Rp.616.332.865 | 650,078,000 | 99,93% | 99.45% | 9% | 3% |
| 14.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | | |
| pengadaan perlengkapan gedung kantor | Rp. 237.000.000 | Rp. 203,962,850 | Rp.608.500.000 | Rp.612.600.000 | Rp.620.000.000 | Rp.224.646.600 | 203,962,850 | 94,79% | 100% | 21% | -5% |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Rp. 860.011.600 | Rp. 69,917,000 | Rp.95.400.000 | Rp.100.000.000 | Rp.110.000.000 | Rp.831.823.840 | 69,917,000 | 96,72% | 100% | 9% | 3% |
| Pengadaan meubelair | Rp. 338.169.500 | Rp. 20,000,000 | Rp.226.300.000 | Rp.230.000.000 | Rp.245.000.000 | Rp.329.392.206 | 20,000,000 | 97,40% | 100% | -6% | -75% |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Rp.1.245.408.000 | Rp. 558,148,000 | Rp.640.230.000 | Rp.650.500.000 | Rp.660.000.000 | Rp.1.180.496.209 | 547,865,000 | 94,79% | 98.16% | -12% | -32% |
| pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | Rp. 574,183,000 | Rp.522.400.000 | Rp.528.000.000 | Rp.532.500.000 | - | 568,210,100 | - | 98.96% | -2% | - |
| pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor | Rp. 86.950.000 | Rp. 37,705,500 | Rp.113.500.000 | Rp.118.200.000 | Rp.113.000.000 | Rp.79.581.000 | 37,415,000 | 91,53% | 99.23% | 5% | -31% |
| pemeliharaan rutin /berkala meubelair | Rp. 25.300.000 | Rp.- | Rp.45.000.000 | Rp.55.000.000 | Rp.60.000.000 | Rp.20.924.000 | - | 82,70% | | 19% | - |
| 15.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Rp. 210.550.500 | Rp.- | Rp.223.200.000 | Rp.230.500.000 | Rp.238.400.000 | Rp.205.315.800 | - | 97,51% | | 3% | - |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Rp. 383.285.500 | Rp. 177,296,500 | Rp.432.500.000 | Rp.440.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.379.483.525 | 177,296,500 | 99,01% | 100% | 3% | -32% |
| 16.PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET | | | | | | | | | | | |
| Pencatatan dan Inventaris Barang / Jasa | Rp. 139.141.500 | Rp. 111,190,000 | Rp.87.000.000 | Rp.95.000.000 | Rp.108.000.000 | Rp.114.882.000 | 111,190,000 | 82,56% | 100% | -5% | -2% |
| penyusunan laporan barang pengguna sementara (LBPS) | Rp. 12.621.500 | Rp.- | Rp.56.000.000 | Rp.65.000.000 | Rp.74.000.000 | Rp.8.306.400 | - | 65,81% | | 42% | - |
| Penyusunan laporan barang pengguna tahunan LBPT | Rp. 10.204.000 | Rp.- | Rp.22.500.000 | Rp.28.000.000 | Rp.35.000.000 | Rp.6.125.000 | - | 60,03% | | 28% | - |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah, ditemukan tantangan (eksternal) dalam pelayanan diantaranya adalah adanya pandemi COVID-19, masih terdapat beberapa aturan di kementerian yang belum sinkron, belum meratanya level akuntabilitas kinerja disetiap Perangkat Daerah, tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan atau kebijakan antar kementerian atau bahkan dalam satu kementerian, yang berakibat pada tidak jelasnya aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan, kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan peluang (eksternal) dalam pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah adalah adanya komitmen yang diimplementasikan dalam sasaran Renstra Kemendagri yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dimana hal tersebut yang selaras dengan tugas di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi yaitu indeks reformasi birokrasi dan nilai evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara hasil telaahan rukun tetangga atau rukun warga ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil telaah rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah pengaruhnya terhadap kebutuhan pelayanan Sekretariat Daerah tidak ada keterkaitan langsung, dan hasil analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga tidak ada keterkaitan langsung dengan Sekretariat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Sukabumi. Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dipimpin oleh 3 (tiga) asisten dimana masing-masing asisten terdiri dari 3 (tiga) bagian sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat Ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | Internal | Eksternal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gambaran Pelayanan Setda: | | | | | |
| 1. Kebijakan | Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan | Belum ada | SDM | Sumber permasalahan kebijakan | Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan |
| 2. Kelembagaan | Terdapat beberapa kegiatan/ sub kegiatan yang penganggarnya menumpang di Bagian/ Bidang lain | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 | SDM | Masih terdapat Beberapa aturan kementerian yang belum sinkron | Adanya ketidak sinkronan antara nomenklatur unit kerja dalam Permendagri 56 Tahun 2019 dengan kodefikasi penganggaran dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 |
| 3. Pengendalian kegiatan | Rendahnya capaian jumlah paket pengadaan dan tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP | Realisasi Kegiatan Kota | SDM, Prosedur regulasi | Kebijakan pengadaan barang/jasa yang sering terjadi perubahan | Belum Optimalnya capaian paket pengadaan tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP |
| 4. Laporan akuntabilitas kinerja setda | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setda belum optimal | Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 | Kapasitas SDM yang memahami akuntabilitas kinerja | Komitmen dari Perangkat Daerah terkait | Belum meratanya level akuntabilitas kinerja perangkat daerah. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---|---|--|
| 5. Manajemen perubahan | Hasil evaluasi manajemen perubahan belum optimal | | Aspek Komunikasi, SDM, Karakteristik implementator dan struktur birokrasi | Komitmen pada setiap perangkat | Penerapan agen perubahan belum dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah |
| 6. Penataan Peraturan Perundang – Undangan | Belum optimalnya penyusunan tata naskah | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 | Sumber Daya (Manusia, Sarpras) Belum adanya fungsional Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan | Pengusulan terkadang mendadak | Pengajuan SKPD masih mentah (belum mengetahui penyusunan tata naskah produk hukum) peraturan perundang-undangan atau kebijakan antar kementerian atau bahkan dalam satu kementerian, yang berakibat pada tidak jelasnya aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan di daerah. |
| 7. Kualitas Pelayanan Publik | Implementasi kebijakan belum optimal | Perwal, proses bisnis, SOP. | Keterbatasan SDM | Peraturan di atasnya berubah-ubah, rantai birokrasi panjang | Ada beberapa perangkat daerah yang belum memiliki SOP (Belum ditetapkan) |
| 8. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Belum dapat mengakomodir semua usulan fasilitasi kegiatan keagamaan | Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat | Keterbatasan SDM dan anggaran | Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan | Tidak berimbang anggaran dengan permohonan fasilitasi |
| 9. Kualitas Layanan Ke-protokol | Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan | | intensitas kerja yang sangat tinggi | Jadwal dengan pihak luar yang tidak terduga | Belum optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan |
| 10. Kerja sama Daerah | - Belum optimalnya kerjasama yang di tindaklanjuti. - Belum optimalnya pemahaman tata cara dan objek kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa dan pihak ketiga | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang | Kapasitas SDM | adanya pengaruh faktor non teknis | Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi |

3.2 Telaah...

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018–2023, Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah **“Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”**. Sebagaimana dimaklumi, bahwa Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan yaitu:

- a. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
- b. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dan inovatif.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah misi pertama dan keempat. Terdapat salah satu program unggulan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, yaitu program peningkatan kualitas kehidupan beragama yang dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah sebagai implementasi dari pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yaitu dengan program peningkatan kualitas lembaga keagamaan, program gerakan magrib mengaji, dan program gerakan subuh berjamaah. Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Wali Kota dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: “Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”. | | | | |
|--|--|---|------------|-----------|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Misi 1: mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga; | | | |

1. Program.....

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|---|---|--|--|
| 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Tidak berimbangnya anggaran dengan permohonan fasilitasi | Keterbatasan SDM, Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan | Komitmen untuk optimalisasi pelayanan keagamaan untuk masyarakat |
| B | Misi 4: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif | | | |
| 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Belum optimalnya bukti dukung dalam pemenuhan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah pada tataran Perangkat Daerah | Kapasitas SDM, dan Sarana Prasarana | Komitmen yang tinggi |
| | | Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan atau kebijakan antar kementerian atau bahkan dalam satu kementerian, yang berakibat pada tidak jelasnya aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan | Ego Sektoral | Komitmen yang tinggi |
| 2 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Perlu peningkatan Koordinasi perumusan kebijakan pengembangan perekonomian daerah | Ego sektoral | Komitmen yang tinggi |
| | | Pengendalian pelaksanaan APBD belum optimal | Lambatnya laporan triwulanan dari Perangkat Daerah, format laporan yang berbeda-beda | Komitmen yang tinggi, peningkatan koordinasi dengan provinsi dan Bappeda |
| | | Sulitnya meningkatkan level maturitas PBJ | Belum fungsionalnya Pokja PBJ, belum memiliki LPSE Mandiri | Komitmen yang tinggi |
| 3 | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Perlu peningkatan fasilitasi sarana prasarana penunjang urusan Sekretariat Daerah | Alokasi anggaran dan beban kerja terlalu tinggi | Komitmen yang tinggi |
| | | Perlu peningkatan layanan keprotokolan | Kapasitas SDM | Kapabilitas SDM yang mumpuni |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|----------------------|
| | | Belum optimalnya Perangkat Daerah yang mengikuti penilaian mandiri Reformasi Birokrasi yang memenuhi aspek penilaian | Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah dan pemenuhan bukti dukung yang belum terpenuhi | Komitmen yang tinggi |
| | | Perlu ditingkatkannya kualitas perencanaan dan data dukung dalam pemenuhan laporan kinerja | Kapasitas dan kuantitas SDM | Komitmen yang tinggi |

3.3 Telaahan Renstra Terhadap Kementerian atau Lembaga

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | | Target | |
|----|--|-------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | 2020 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia | 1 | Indeks Demokrasi Indonesia | 77,36 | 78,66 |
| | | 2 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu | 77,5% | 79,5% |
| | | 3 | Indeks Kinerja Ormas. | -* | Nilai 70 |
| 2 | Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah | 1 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. | Nilai 2,38 | Nilai 2,40 |
| | | 2 | Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). | 67,1 | 67,5 |
| | | 3 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. | Nilai 2,865 | Nilai 2,885 |
| | | 4 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya | Nilai 2,310 | Nilai 2,330 |
| 3 | Meningkatnya kewaspadaan nasional | 1 | Indeks Kewaspadaan Nasional. | -* | 64 |
| 4 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. | 1 | Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” | -* | 150 daerah |
| | | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas | -* | Nilai 60 |
| 5 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri | 1 | Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) per tahun | 15% | 80% |
| | | 2 | Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri | Level 3 (75%) | Level 3 (100%) |
| | | 3 | Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional | Level 3 (75%) | Level 3 (100%) |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|----|---|----|---|---|--|
| | | 4 | Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni | Nilai 3,00 | Nilai 3,60 |
| 6 | Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah. | 1 | Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah | -* | Nilai 85 (Sangat Tinggi) |
| 7 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | 1 | Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | -* | Nilai 85 (Sangat Tinggi) |
| | | 2 | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai 2,85 (Cukup) | Nilai 3,2 (Sangat Tinggi) |
| | | 3 | Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM | 30% | 100% |
| | | 4 | Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. | -* | Nilai 80 (Sangat Sinkron) |
| | | 5 | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" | 10% | 75% |
| | | 6 | Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai 36 | Nilai 37 |
| | | 7 | Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. | -* | 36% |
| | | 8 | Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama". | 55 Daerah | 165 Daerah |
| | | 9 | Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. | Nilai 80 | Nilai 100 |
| | | 10 | Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah | -* | Nilai 90 (A) |
| 8 | Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. | 1 | Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan |
| | | 2 | Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif) | 1.923 Lembaga Pengguna | 3.123 Lembaga Pengguna |
| 9 | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan | 1 | Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan | -* | Nilai 60 |
| 10 | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri | Nilai 85,01 | Nilai 93,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
|----|--|---|--|----------|-----------|
| 11 | Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas | 1 | Indeks Pengawasan Internal | Nilai 80 | Nilai 100 |
| | | 2 | Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus | Nilai 80 | Nilai 85 |
| 12 | Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | 1 | Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. | 40% | 65% |

Sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat di simpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah namun ada beberapa indikator sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri yang selaras dengan tugas di Sekretariat Daerah , yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil telaahan rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah pengaruhnya terhadap kebutuhan pelayanan Sekretariat Daerah tidak ada keterkaitan langsung.

Sedangkan hasil analisis terhadap dokumen KLHS yang dilihat dari aspek kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; Kinerja layanan atau jasa ekosistem; Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat ketentraman dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat Daerah tidak ada keterkaitan langsung terhadap KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Suatu.....

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Daerah yang berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman yang tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Analisis isu-isu strategis dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Kota Sukabumi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018), berdasarkan gambaran Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah, dan telaah Renstra Kemendagri dapat ditentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah yaitu:

- a. peningkatan pelaksanaan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. optimalisasi fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi;
- d. optimalisasi pelayanan dan fasilitasi kepala daerah atau wakil kepala daerah; dan
- e. optimalisasi koordinasi perekonomian, pengendalian pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur, disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C)*.

Penetapan tujuan Sekretariat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang diterjemahkan pada tujuan dan sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Sukabumi terutama pada Misi ke-1 dan Misi ke-4.

Berdasarkan hasil perumusan yang telah dilakukan, maka dokumen Renstra sebelum perubahan terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 3 indikator tujuan, serta 9 (sembilan) sasaran dengan 13 indikator sasaran Sekretariat Daerah periode 2018–2023. Secara kesinambungan tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.a.....

Gambar 4.1a (Sebelum Perubahan)



Tujuan...

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah yang dapat digambarkan dalam table 4.1 a sebagai berikut:

Tabel 4.1 a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET | REALI SASI | TARGET | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Tercapainya peningkatan keimanan dan kerukunan antar umat beragama | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | n.a | 94,68 | 94,98 | 73,35 | 95,3 | Bag. Kesra |
| | | 1. Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | n.a | 94,68 | 94,98 | 73,35 | 95,28 | Bag. Kesra |
| | | Meningkatkan pemahaman nilai - nilai keagamaan | Tingkat Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | Bag. Kesra |
| | | Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan | 1.Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | Bag. Kesra |
| 2 | Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik | | Nilai EKPPD | Nilai | 3,39 | N.A | 3,40 | N.A | 3,42 | Bag.Tapem |
| | | | Nilai Penguatan Akuntabilitas | Nilai | 4,57 | 4,57 | 6 | 4,57 | 5,00 | Bag. Organisasi |
| | | 2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai EKPPD | Nilai | 3,39 | N.A | 3,40 | N.A | 3,40 | Bag.Tapem |
| | | | 2.Nilai evaluasi AKIP Kota Sukabumi Kompoonen Pelaporan Kinerja | Skor | N.A | 10,78 | 11,10 | 12,42 | 11,85 | Bag. Tapem- Bag. Organisasi |
| | | 3.Meningkatnya kualitas perekonomian dan pembangunan | 3.Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | Persen | N.A | N.A | 100,00 | 100,00 | 100 | Bagian Perekonomian |
| | | | 4. Indikator Layanan Pengadaaan | Persen | N.A | N.A | 20,93 | 20,93 | 30 | Bagian PBJ |

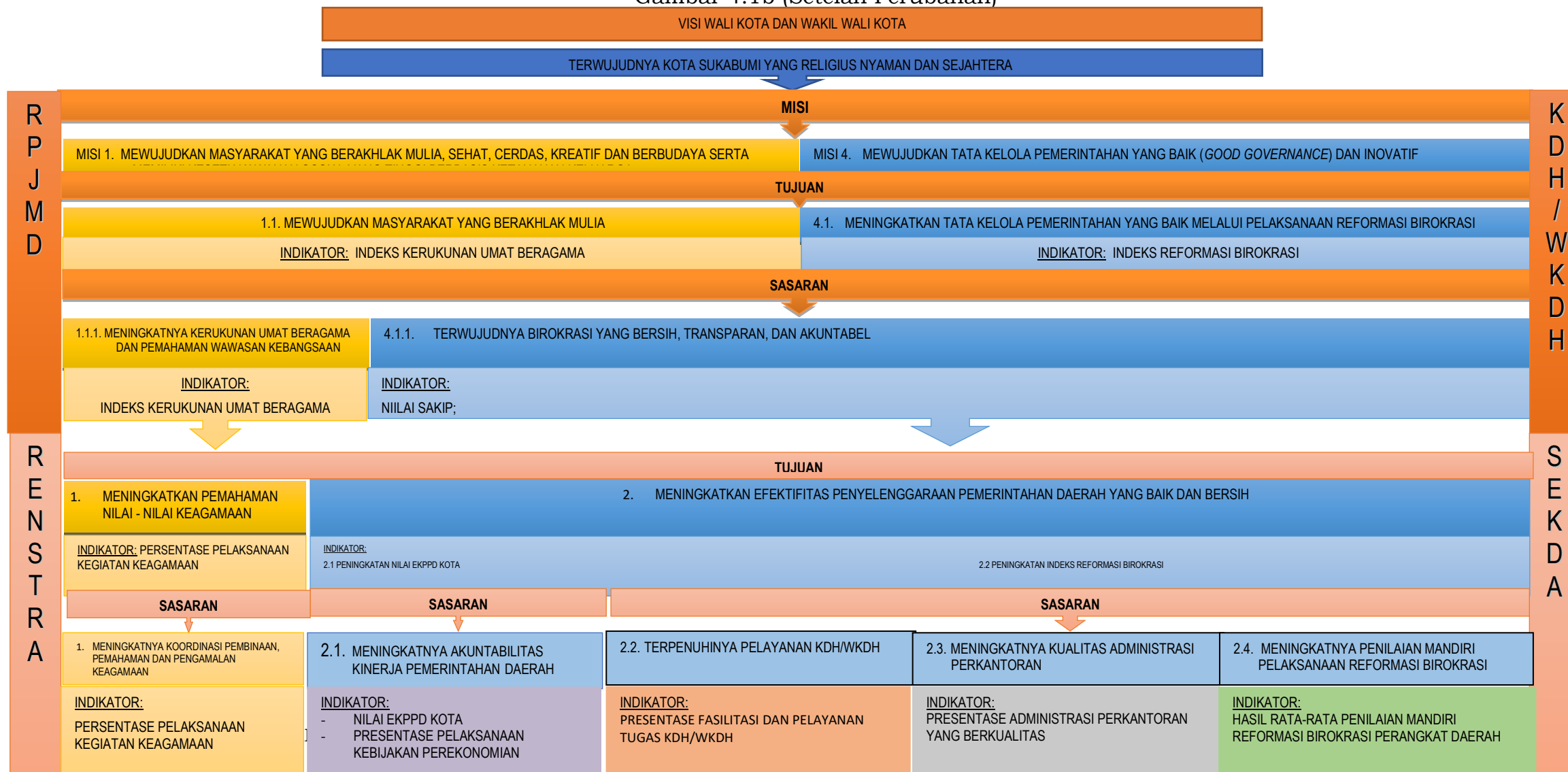
4. Meningkatnya...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|--|---|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | 4.Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 5.Indeks Pelayanan Publik | angka | N.A | 2,62 | 2,6 | 2,61 | 2,75 | Bag. Organisasi,Bag. PBJ,Bagian Protokol,Komunikasi dan TU Pimpinan |
| | | | 6. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai | 3,89 | 4,31 | 4,80 | 4,41 | 4,41 | Bag. Organisasi,Bag. PBJ,Bagian Protokol,Komunikasi dan TU Pimpinan |
| | | 5.Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi | 7. Nilai Manajemen Perubahan | Nilai | 3,06 | 2,79 | 3,08 | 2,85 | 3,09 | Bag. Organisasi |
| | | | 8. Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan | Nilai | 2,71 | 2,71 | 3,07 | 2,71 | 3,08 | Bag. Hukum |
| | | | 9. Nilai Penataan dan Penguataan Organisasi | Nilai | 2,66 | 2,66 | 2,7 | 2,7 | 2,72 | Bag. Organisasi |
| | | | 10. Nilai penataan tata laksana | Nilai | 3,04 | 2,86 | 3,5 | 3,03 | 3,6 | Bag. Organisasi |
| | | cakupan pemenuhan sarana prasarana dan kualitas layanan keprotokolan | Persen | N.A | N.A | 100 | 100 | 100 | 100 | Bag. umum dan Bag. Protokol,Komunikasi dan TU Pimpinan |
| | | 6.Meningkatnya kualitas perencanaan,penganggaran dan pelaporan kinerja Setda | 11. nilai hasil evaluasi AKIP Setda | Angka | N.A | 42,56 | 45,00 | 46,91 | 47 | Bag. Adm. Pembangunan |
| 3 | Meningkatkan sarana prasarana penunjang dan kualitas layanan keprotokolan | | 12. Meningkatnya sarana dan prasarana sdm aparatur, kepala daerah dan wakil kepala daerah | Persen | Persen | N.A | N.A | 100 | 100 | Bag. Umum |
| | | 8. Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 13. persentase ketersediaan administrasi perkantoran | Persen | N.A | N.A | 100 | 100 | 100 | Bag. Umum |
| | | 9.Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan | 14. persentase layanan keprotokolan | Persen | N.A | N.A | 100 | 100 | 100 | Bag. Protokol,Komunikasi dan TU Pimpinan |

Berdasarkan...

Berdasarkan hasil perumusan yang telah dilakukan, mengacu pada Perubahan RPJMD 2018-2023 dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah, maka dokumen Renstra setelah perubahan terdapat 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) indikator tujuan, serta 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran Sekretariat Daerah periode 2018–2023. Keselarasan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Sukabumi 2018–2023 dapat terlihat yakni dalam misi pertama, tujuan RPJMD adalah “Mewujudkan Masyarakat berkualitas Berakhlak Mulia” dengan indikator: indeks kerukunan umat beragama. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sasaran meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama dan Pemahaman dengan indikator: indeks kerukunan umat beragama. Sedangkan pada misi ke empat tujuan dalam RPJMD adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran “Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dengan indikator nilai Sakip. Secara berkesinambungan dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1b (Setelah Perubahan)



Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah.

Tabel 4.1b
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---|--------------------------|-------------|--|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan Pemahaman Nilai - Nilai Keagamaan | | Cakupan Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan | 100 | 100 | 100 | Bagian Kesra |
| | | Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan | 100 | 100 | 100 | Bagian Kesra |
| 2 | Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik | | - Peningkatan Nilai EKPPD Kota | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Bagian Perekonomian |
| | | | - Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi | 0,68 | 0,05 | 0,5 | Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
| | 2.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Nilai EKPPD Kota | 3,44 | 3,46 | 3,48 | Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan | |
| | | Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | 100% | 100% | 100% | Bagian Perekonomian | |
| | 2.2. Terpenuhinya Pelayanan KDH/WKDH | Presentase Fasilitasi dan Pelayanan Tugas KDH dan WKDH | 100 | 100 | 100 | Bagian Prokopim, Bagian Umum | |

2.3. Meningkatnya...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|----------|--|---|----------|----------|----------|--|
| | | 2.3. Meningkaynya kualitas administrasi perkantoran | Presentase administrasi perkantoran yang berkualitas | 100% | 100% | 100% | Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Prokopim |
| | | 2.4 Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Hasil Rata-rata Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 25 | 27 | 30 | Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.....

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|---|
| Visi : | Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera | | | | |
| Misi 1 : | Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, Kreatif dan Berbudaya Serta Memiliki Kesetiakawanan Sosial yang Tinggi Berbasis Ketahanan Keluarga | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan | 1. | meningkatkan koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan. | 1.1 | Meningkatkan aktifitas keagamaan dan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan | 1.1.1 Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| | | | 1.2 | Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama | 1.2.1 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 1.2.2 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat |
| Misi 4 : | MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih | 1 | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1.1 | Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah | 1.1.1 Meningkatkan Pengelolaan administrasi kewilayahan 1.1.2 Meningkatkan Penatan administrasi pemerintahan 1.1.3 Meningkatkan Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah 1.1.4 Meningkatkan Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri 1.1.5 Meningkatkan Evaluasi pelaksanaan kerjasama |

1.2. Meningkatkan....

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---------------------------------|-----|--|-------|--|
| | | | 1.2 | Meningkatkan pelaksanaan kebijakan perekonomian | 1.2.1 | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD |
| | | | | | 1.2.2 | Meningkatkan pengendalian dan distribusi perekonomian |
| | | | | | 1.2.3 | Meningkatkan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro |
| | 2 | Terpenuhinya Pelayanan KDH/WKDH | 2.1 | Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2.1.1 | Meningkatkan Fasilitasi Keprotokolan |
| | | | | | 2.1.2 | Meningkatkan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| | | | | | 2.1.3 | Meningkatkan kualitas pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| | | | 2.2 | Meningkatnya Fasilitasi Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | 2.2.1 | Meningkatkan kualitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | 2.2.2 | Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | 2.2.3 | Meningkatkan Fasilitasi Keruma Tanggaan Sekretaria Daerah |
| | | | | | 2.2.4 | Meningkatkan kualitas penyediaan peralatan, perlengkapan kantor dan peralatan rumah tangga |
| | | | | | 2.2.5 | Meningkatkan kualitas penyediaan bahan bacaan dan penggandaan |

2.2.6. Meningkatkan...

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|--|-----|--|--------|--|
| | | | | | 2.2.6 | Meningkatkan kualitas fasilitasi kunjungan tamu |
| | | | | | 2.2.7 | Meningkatkan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |
| | | | | | 2.2.8 | Meningkatkan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | 2.2.9 | Meningkatkan layanan kebutuhan Operasional KDH/WKDH |
| | | | | | 2.2.10 | Meningkatkan layanan penatausahaan TU. Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian |
| | | | | | 2.2.11 | Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan, Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah dan operasional KDH/WKDH |
| | 3 | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 3.1 | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan, dan Laporan Kinerja | 3.1.1 | Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah |
| | | | 3.2 | Meningkatnya pengendalian pelaksanaan APBD | 3.2.1 | Meningkatkan kualitas administrasi dalam pengendalian dan evaluasi APBD |

4. Meningkatnya...

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|--|-----|---|---|---|
| | 4 | Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 4.1 | Meningkatnya hasil rata-rata jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memenuhi aspek penilaian. | 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 | Meningkatkan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja Reformasi Birokrasi Meningkatkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Meningkatkan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | 4.2 | Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi Produk Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM serta Dokumentasi Hukum | 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | Harmonisasi produk hukum yang dibuat Meningkatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Meningkatkan fasilitasi pelayanan dokumentasi dan Informasi hukum |
| | | | 4.3 | Meningkatnya level maturitas PBJ | 4.3.1 4.3.2 4.3.3 | Meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Meningkatkan Layanan Pengadaan secara elektronik Meningkatkan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Terdapat tiga program di Sekretariat Daerah yaitu:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program meliputi:
 - a. Presentase layanan keprotokolan;
 - b. Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memenuhi aspek penilaian;
 - c. Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Presentase dokumen perencanaan, laporan kinerja tepat waktu.
2. Program pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja meliputi:
 - a. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Presentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta Dokumentasi Hukum; dan
 - c. Presentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat.
3. Program perekonomian dan pembangunan
 - a. Presentase pengendalian pelaksanaan APBD
 - b. Presentase koordinasi perumusan kebijakan pengembangan Perekonomian Daerah; dan
 - c. Level maturitas pelayanan PBJ

Program tersebut dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab setiap bagian di Sekretariat Daerah sesuai dengan indikator kinerja program yang menjadi kewenangannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1....

**Tabel 6.1 (T-C 27.a)
Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2019-2020**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|-------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | Setda |
| | | | | | Nilai SAKIP; Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran | | | 95 | 10,767,139,500 | 95 | 11.493.060.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | % | Persentase meningkatnya pelayanan administrasi dan surat menyurat | | | 90 | 60.000.000 | 90 | 60.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | % | Persentase meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | 90 | 604.000.000 | 90 | 604.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.003. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | % | Kegiatan protokoler dan kegiatan Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar | | | 90 | 1,313,001,000 | 90 | 866.013.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.007. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | % | tersedianya administrasi keuangan | | | 90 | 1.768.340.000 | 90 | 1.768.340.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | % | persentase pemenuhan sarana kebersihan yang dibutuhkan kantor setda kota sukabumi dan meningkatnya kebersihan di lingkungan Setda | | | 90 | 167.200.000 | 90 | 167.200.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.009 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | % | Persentase meningkatnya administrasi pelayanan Perkantoran di Lingkungan Setda | | | 90 | 164.995.000 | 90 | 164.995.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | % | Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan alat tulis kantor di lingkungan Setda | | | 90 | 185.162.500 | 90 | 185.162.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | % | Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | | | 90 | 376,900,000 | 90 | 241.900.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | % | Terpenuhinya alat Penerangan Gedung Sekretariat Daerah | | | 90 | - | 90 | 75.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | bangunan kantor | | | | | | | | | |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | % | Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi | | | 90 | 616,750,000 | 90 | 1.180.750.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | % | Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur di lingkungan sekretariat daerah Kota Sukabumi | | | 90 | 710,951,000 | 90 | 750.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | % | Terlayannya tamu pemerintah Kota Sukabumi | | | 90 | 1,890,900,000 | 90 | 2.198.500.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | % | Meningkatnya pelayanan kedinasan di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi | | | 90 | 1,592,100,000 | 90 | 1.500.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.025. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | % | Persentase Meningkatnya Pelayanan Keamanan Bangunan Gedung Sekretariat | | | 100 | 214,060,000 | 100 | 194.700.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.026 | Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Jabatan/Dinas | % | Persentase meningkatnya Pelayanan Keamanan Rumah Jabatan / Dinas | | | 100 | 180,180,000 | 100 | 148.500.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.01.027. | Rapat - Rapat Koordinasi dan Komunikasi Kepala Daerah | % | Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi | | | 90 | 922,600,000 | 90 | 1.388.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | % | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 90 | 6,866,923,100 | 90 | 5.213.658.600 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.006 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | % | Tercukupinya Kebutuhan barang di Rumah Jabatan | | | 90 | 674,379,000 | 90 | 472.200.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | % | Kelancaran pelaksanaan tugas harian | | | 90 | 237,000,000 | 90 | 364.104.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | % | Tercukupinya Kebutuhan Barang di Rumah Jabatan | | | 90 | 414,684,500 | 90 | 319.934.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | % | Meningkatkan pelaksanaan tugas harian | | | 90 | 860,011,600 | 90 | 494.011.600 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.010. | Pengadaan mebeleur | % | Meningkatkan Pelaksanaan Tugas harian | | | 90 | 338,169,500 | 90 | 122.929.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.018. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | % | Kelancaraan pelaksanaan tugas harian | | | 90 | 533,452,500 | 90 | 373.452.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | % | Rumah Dinas dalam Keadaan Bersih, Indah, dan Nyaman | | | 90 | 1,447,313,000 | 90 | 1.095.413.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | % | Kantor Sekretariat Daerah Bersih, Indah, dan Nyaman | | | 90 | 1,245,408,000 | 90 | 985.408.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|---------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.023 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | % | Kendaraan Walikota dan Wakil Walikota dalam keadaan Baik | | | 90 | 628,400,000 | 90 | 108.400.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | % | Kendaraan Dinas/Operasional di Setda dalam keadaan Baik | | | 90 | - | 90 | 500.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.025 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | % | Perlengkapan Rumah Jabatan/Dians dalam keadaan Baik | | | 90 | 80,850,000 | 90 | 23.050.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | % | Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah dalam keadaan Baik | | | 90 | 86,950,000 | 90 | 76.950.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | % | Terpenuhinya kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota di Rumah Jabatan | | | 90 | 295,005,000 | 90 | 252.505.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.02.029. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | % | Meubleair di Setda dalam Keadaan baik | | | 90 | 25,300,000 | 90 | 25.300.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.03. | Program Peningkatan Disiplin | % | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | 100 | 1,000,811,000 | 100 | 1.000.811.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Aparatur | | | | | | | | | |
| | | 4.00.4.00.01.01.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | % | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Harian Dilapangan | | | 90 | 210,550,500 | 90 | 210.550.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.03.003 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | % | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Harian Dilapangan | | | 90 | 90,225,000 | 90 | 90.225.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | % | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dilapangan | | | 90 | 383,285,500 | 90 | 383.285.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.03.007 | Pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH | % | Kelancaran pelaksanaan tugas harian KDH&WKDH | | | 90 | 316,750,000 | 90 | 316.750.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur | | | 80 | 160,230,000 | 80 | 158.830.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|----------|---|--------------|------|---|------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.05.001. | Pendidikan dan pelatihan formal | % | Persentase Meningkatnya Kinerja Aparatur Setda Kota Sukabumi | | | 80 | 50,000,000 | 80 | 50.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.05.002 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | % | Meningkatnya Pemahaman Aparatur Setda Dalam Bidang Kepegawaian Sesuai Peraturan dan Meningkatnya Motivasi | | | 80 | 96,800,000 | 80 | 96.800.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.05.005 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | % | Persentase Meningkatnya Penggunaan Data untuk Pedoman dalam Analisa Pengembangan karir (Promosi) & Mutasi Pegawai | | | 85 | 13,430,000 | 85 | 12.030.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | % | Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja keuangan | | | 60 | 35,700,000 | 60 | 27.700.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|------------|--------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Keuangan | | | | | | | | | |
| | | 4.00.4.00.01.01.06.001. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | % | Tersedia laporan akuntabilitas setda daerah sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut | | | 80 | 25,000,000 | 80 | 17.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.06.002. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | % | Presentase Terpenuhi Penyusunan Laporan Semesteran | | | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.06.003 | Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran | % | Persentase Terpenuhi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | | | 90 | 1.600.000 | 90 | 1.600.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.06.004 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | % | Persentase Terpenuhi Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | 90 | 3.000.000 | 90 | 3.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.4.00.01.01.06.005 | Penyusunan laporan dan evaluasi sistem pengendalian inten pemerintah (SPIP) SKPD | % | Persentase Terpenuhinya Laporan SPIP Setda | | | 90 | 4.100.000 | 90 | 4.100.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | % | Peningkatan Pengelolaan Barang dan Jasa | | | 100 | 161.967.000 | 100 | 161.967.000 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.07.002 | Percatatan dan inventaris barang dan jasa | % | Terbitnya Laporan Barang persediaan semesteran Setda Kota Sukabumi | | | 90 | 139.141.500 | 90 | 139.141.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.07.003. | penyusunan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) | % | Terbitnya Laporan Semesteran Setda Kota Sukabumi | | | 90 | 12.621.500 | 90 | 12.621.500 | Setda |
| | | 4.00.4.00.01.01.07.004 | Penyusunan laporan barang pengguna tahunan | % | Terbitnya Laporan Barang Tahunan Setda Kota Sukabumi | | | 90 | 10.204.000 | 90 | 10.204.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|--|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | (LBPT) | | | | | | | | | |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | % | | | | | 6,114,002,200 | | 7.594.658.934 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.001 | Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat | % | Tersampainya informasi tentang pemerintahan kepada RT, RW dan masyarakat | | | 85 | 81,515,300 | 85 | 75.451.371 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.002. | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/1 | % | Penerimaan Kunjungan Kerja Terjalin Baik | | | 80 | 32,475,000 | 80 | 34.748.250 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | uar negeri | | | | | | | | | |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.003 | Koordinasi unsur MUSPIDA | % | Adanya bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan/kebijakan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas saran dan pertimbangan dari Unsur Pimpinan Daerah Kota Sukabumi dan Instansi terkait | | | 90 | 1,158,270,000 | 90 | 1.291.955.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.004. | Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah | % | Tersedianya bahan perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 80 | 361,089,500 | 80 | 203.060.765 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.006. | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | % | Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan | | | 80 | 357,218,000 | 80 | 382.223.260 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.007 | Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan | % | Terbayarkannya honorarium marchingband dan terfasilitasinya kegiatan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi | | | 90 | 887,800,000 | 90 | 911.200.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.008 | Kegiatan pelaksanaan hari jadi kota/kabupaten/provinsi | % | Terlaksananya rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-105 Kota Sukabumi Tahun 2020 | | | 90 | 778,125,000 | 90 | 778.025.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.009 | Kegiatan pelaksanaan hari besar nasional | % | Terlaksananya rangkaian kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional | | | 90 | 959,205,000 | 90 | 959.205.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.011. | Koordinasi dan fasilitasi kegiatan asosiasi pemerintah kota se-indonesia | % | Terciptanya sinergitas dan koordinasi antarpemerintah kota dan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur | | | 80 | 426,869,400 | 80 | 956.750.288 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.013 | Optimalisasi pelayanan tamu pemerintah daerah | % | Terlayannya Tamu Pemerintah Kota Sukabumi | | | 90 | 814,295,000 | 90 | 600.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.014 | Koordinasi dan konsultasi peningkatan kinerja pemerintah daerah | % | Tersedianya data informasi tentang persuratan serta panduan bagi KDH/WKDH dalam memberikan sambutan atau presentasi | | | 90 | 157,140,000 | 90 | 132.140.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.015 | Peningkatan kapasitas pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah | % | Persentase Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | | | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.15.017. | Kegiatan keliputan dan kehumasan bagi KDH/WKDH | % | | | | 90 | 759,400,000 | 90 | 1.169.900.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.18. | Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah | % | Meningkatnya kerjasama daerah | | | 80 | 461,776,300 | 80 | 550.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.18.001 | Optimalisasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik | % | Peningkatan Pelayanan publik dan daya saing daerah | | | 80 | 166,310,000 | 80 | 220.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.18.005. | Pengendalian (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan kerjasama daerah | % | 1. Pelaksanaan kerjasama daerah dapat dipantau berdasarkan data dan informasi yang ada 2. Kepala daerah memiliki dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama daerah | | | 100 | 137,307,300 | 100 | 150.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.18.006. | Peningkatan/pembentukan kerjasama luar negeri | % | Peningkatan jejaring Pemerintah Daerah Kota/Kab dalam perencanaan pembangunan | | | 100 | 82,205,000 | 100 | 130.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|---------------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.18.007 | kerjasama penjangkauan aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan | % | Persentase peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemda Kab/Kota lainnya di Indonesia serta pihak ketiga | | | 100 | 75,954,000 | 100 | 50.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | % | | | | 100 | 1,365,767,500 | 100 | 1.499.417.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.003 | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan | % | Persentase Jumlah Raperda yang disampaikan ke DPRD dan Peraturan Wali Kota serta Keputusan Wali Kota yang diterbitkan | | | 100 | 292,262,500 | 100 | 290.715.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.004. | Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | % | Persentase pemahaman akan peraturan perundang undangan oleh aparat | | | 100 | 36,250,000 | 100 | 43.500.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.005. | Publikasi peraturan perundang-undangan | % | Persentase meningkatnya pemahaman akan produk produk hokum oleh aparat dan masyarakat | | | 90 | 372,320,000 | 90 | 372.320.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.006 | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah | % | Persentase review peraturan perundang-undangan terhadap produk hukum peraturan daerah yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah sehingga produk hukum yang ada dapat dicabut, direvisi atau masih berlaku | | | 90 | 31,100,000 | 90 | 97.320.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.007 | Pemberian advokasi hukum | % | Pemberian advokasi penanganan perkara di luar pengadilan | | | 90 | 144,850,000 | 90 | 149.820.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.008 | Pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum | % | Persentase pemahaman akan produk hukum oleh aparat dan masyarakat | | | 90 | 277,170,000 | 90 | 194.887.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.010. | Penangan perkara litigasi | kasus | jumlah perkara yang tertangani yang menyangkut pemerintah daerah kota sukabumi | | | 2 | 47,300,000 | 2 | 80.640.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.011 | Optimalisasi peningkatan wawasan bidang hukum | % | Persentase keikutsertaan juara lomba keluarga sadar hukum tingkat provinsi jawa barat dan pemahaman akan peraturan perundang undangan oleh masyarakat | | | 100 | 107,515,000 | 100 | 207.515.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.19.013 | Uji Publik rancangan peraturan perundang-undangan | % | Persentase pemahaman akan rancangan peraturan perundang undangan daerah oleh aparat dan masyarakat sebelum mendapat persetujuan DPRD | | | 90 | 57,000,000 | 90 | 62.700.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21. | Program ketatalaksanaan dan kelembagaan antar pemerintah dan pemerintah daerah | % | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal | | | 100 | 1,242,464,000 | 100 | 1.110.802.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.001 | Penyusunan pedoman teknis organisasi dan tata kerja perangkat daerah | % | Persentase Acuan Kebijakan Bagi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | | | 100 | 212,787,000 | 100 | 100.560.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.004. | Penyusunan tata hubungan kerja pemerintah dan pemerintah daerah | % | Persentase acuan penyusunan standar operasional prosedur | | | 100 | 100.560.000 | 100 | 100.560.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|---|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.007. | Evaluasi analisa jabatan | % | Tersedianya bahan kebijakan bagi penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | | | 80 | 55.000.000 | 80 | 55.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.008. | Penataan jabatan fungsional | % | Tersedianya bahan kebijakan bagi penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | | | 80 | - | 80 | 51.477.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.010. | Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan secara regional, sektoral dan nasional | % | Persentase akselerasi kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan secara sektoral, regional, nasional dalam rangka peningkatan efektifitas organisasi | | | 100 | 215,078,000 | 100 | 187.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.011 | Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi | % | Nilai hasil Refoormasi Birokrasi | | | 90 | 210,677,000 | 90 | 95.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|--|----------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | | | Indeks Pelayanan Publik | | | | | | | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.012. | Koordinasi pelaksanaan survey pelayanan publik | unit | -Jumlah acuan peningkatan pelayanan publik -unit layanan publik yang masuk top 40 -unit pelayanan publik berkategori "AA" | | | -15 -1 -5 | 164,000,000 | -15 -1 -5 | 420.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.014. | Evaluasi dan penyusunan SPM | % | Presentase Pelayanan Dasar yang sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan | | | 100 | 248,162,000 | 10 | 33.705.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---|-------------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|---------------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.21.015. | Penyusunan standart pelayanan dan sistem operasional prosedur | % | | | | | 36,200,000 | | 67.500.000 | Setda |
| | Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel | | | | Nilai SAKIP, Opini BPK terhadap lapporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 2,579,097,800 | | 2.477.174.765 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.22. | Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | % | | | | | 2,579,097,800 | | 2.477.174.765 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|---|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.22.001 | Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah | % | Digunakannya buku laporan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EKPPD | | | 80 | 191,850,000 | 80 | 355.279.500 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.22.004 | Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah | % | 1. Digunakannya buku laporan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB dan BPKP 2. Digunakannya dokumen Penetapan Kinerja sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pada tahun berkenaan | | | 90 | 1,455,998,300 | 90 | 1.255.998.300 | Setda |
| | | | | | | | | 90 | | 90 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.22.008 | Optimalisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan | % | Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan aparat 1. Pemerintah Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya mengenai Penguatan OPD Kecamatan 2. Meningkatnya Kinerja Camat & Lurah | | | 85 | 589,479,000 | 85 | 500.202.530 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.22.009. | Penataan dan penegakan batas antar daerah | % | Tertatanya dan tegasnya batas dalam daerah Kota Sukabumi Per Kecamatan | | | 85 | 156,646,000 | 85 | 167.611.220 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.22.011. | Kegiatan pembakuan nama repabumi | % | Terinventarisasi nya Unsur-unsur Rupabumi yang ada di Kota Sukabumi | | | 80 | 185,124,500 | 80 | 198.083.215 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.23. | Program peningkatan kesadaran | % | | | | 80 | 109,070,000 | 80 | 109.070.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Hukum dan HAM | | | | | | | | | |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.23.001. | Sosialisasi rencana aksi nasional (RAN) HAM Skala kota | % | a. dicanangkan sebagai kota peduli HAM b. terlaksananya pelaporan ranham c. terwujudnya pelajar Duta HAM | | | 100 | 109,070,000 | 100 | 109.070.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.24 | Program Lingkungan Sosial (DBHCHT) | % | Meningkatnya keterpaduan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Sukabumi | | | 80 | 21,000,000 | 80 | 21.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.24.001. | Optimalisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan DBHCHT | OPD | Pelaksanaan kegiatan DBHCHT yang lebih optimal dan terkoordinasi | | | 6 | 21,000,000 | 6 | 21.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.25. | Program Pelayanan dan Penanganan Masalah Barang dan Jasa | % | Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang penyelesaian sanggah dan aduan | | | 100 | 81,522,000 | 100 | 101.122.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.25.001 | Pengelolaan sanggah pengadaan barang dan jasa | % | Digunakannya buku pengelola sanggah sebagai bahan evaluasi dan kajian dalam proses pengadaan barang/jasa tahun berikutnya | | | 100 | 23,122,000 | 100 | 23.122.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.25.002 | Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan | % | Peta resiko dan strategi mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa | | | 100 | 58,400,000 | 100 | 78.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|--|--------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.26 | Program Pelayanan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa | % | Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai peraturan perundang-undangan serta pelaku pengadaan barang/jasa di Kota Sukabumi yang memahami regulasi | | | 80 | 670,944,600 | 80 | 989.396.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.26.001 | Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa | % | Organisasi pengadaan dan Penyedia yang memahami regulasi dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa | | | 100 | 144.545.000 | 100 | 144.545.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|--------|---|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.26.002. | Konsolidasi RPP Pengadaan Barang/Jasa | % | Peningkatan kompetensi di internal BPBJ serta pengetahuan pada tingkat PD di bidang pengadaan barang/jasa | | | 100 | 221,605,000 | 100 | 243.765.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.26.003. | Klarifikasi, Evaluasi dan Pembuktian Penawaran/Kualifikasi | % | Hasil pembuktian kualifikasi dan klarifikasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangkaian proses pemilihan penyedia | | | 100 | 78,250,000 | 100 | 120.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.26.004. | Penyusunan Juklak dan Juknis Pengadaan Barang/Jasa | % | Pelayanan pengadaan barang/jasa kepada para pemangku kepentingan yang memenuhi standar ISO 9001:2015 sebagai Centre of Excellence | | | 100 | 148,244,600 | 100 | 118.244.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|--|-------------------------|---|--------|--|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, Pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | | | | | | | Setda |
| | | 4.00.01.4.00 .01.01.27. | Program Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan | % | Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur keagamaan | | | 100% | 1,105,665,630 | 100 | 8.558.928.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|---|--------|---|--------------|------|---|-------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.27.001 | Pembinaan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Luhur dan Pengamalan Ajaran Agama | % | 1. Terpilihnya siswa-siswi penghafal al-qur'an dan warga berprestasi bidang MTQ 2. Sasaran yang dibina mampu mengembangkan ukhuwah islamiyyah dalam konteks pemahaman dan pengamalan keagamaan 3. Terlaksananya shalat shubuh berjamaah 4. Terlaksananya kegiatan magrib mengaji 5. Terbitnya Rancangan Perda Kota Halal Friendly | | | 100 | 980,069,450 | 100 | 3.641.366.700 | Setda |
| | | | | | | | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | 100 | | 100 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------|------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.27.002 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan | % Orang % | 1. Terlaksananya pelayanan keagamaan dan kegiatan Tabligh Akbar 2. Terlaksananya pelayanan terhadap jemaah haji dan umroh 3. Tersedianya keranda jenazah di wilayah yang membutuhkan | | | 1. 100 % & 1 kali 2. 351 3. 100 | 1.479.245.200 | 1. 100 % & 1 kali 2. 351 3. 100 | 1.479.245.200 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.27.003 | Fasilitasi Insentif Pendidik Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, Raudthul Athfal, TPQ dan Marbot | orang | Terlaksananya pembinaan dan penghargaan terhadap guru agama dan marbot masjid | | | 1656 | 3.270.269.100 | 1656 | 3.270.269.100 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-------------------------------|--|-----------|--|--------------|------|---|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.27.004 | Peringatan Hari Besar Keagamaan | % | 1. Terbinanya para mustami pengajian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari | | | 100 | 125,596,180 | 100 | 168.047.000 | Setda |
| | | | | Eksemplar | 2. Cetak Buku Panduan | | | 1 | | 1 | | |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.28. | Program Layanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat | % | Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat kota sukabumi | | | 100 | 1.539.501.450 | 100 | 1.539.501.450 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--------|---------|------|----------------------|--------|---|--------------|------|---|-----|--------|-----|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | 9. Terlaksananya pertemuan lintas agama | | | 100 | | 100 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------------------|--|----------|---|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.28.002. | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | Sekolah | 1. Tercapainya Prestasi program pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) ditingkat provinsi dan nasional 2. Terlaksananya program pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) lainnya 3. Tersampainya program kerja tim pembina UKS Kota Sukabumi kepada Tim pembina UKS kecamatan dan tim pelaksana UKS disekolah | | | 1 | 463.031.450 | 1 | 463.031.450 | Setda |
| | | | | Kegiatan | | | | 4 | | 4 | | |
| | | | | Modul | | | | 1 | | 1 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------|--|--------------|------|---|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.28.003 | Koordinasi Pemberian Ijin Pengumpulan Uang atau Barang Kegiatan | Panitia Pelaksana | 1. Tercapainya keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan Panitia Pelaksana dilapangan 2. Terserapnya Ilmu hasil kunjungan kerja | | | 20 | 46.000.000 | 20 | 46.000.000 | Setda |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | |
| | | | | | Op | | | | | | | |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.29. | Program Penyusunan Bahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah | % | Meningkatnya tertib administrasi dan keuangan daerah | | | 100 | 245,000,000 | 100 | 219.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.29.001 | Penyusunan analisa standar belanja | SKPD | Pedoman Penyusunan RKA/DPA SKPD | | | 33 | 33,000,000 | 33 | 44.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------------------------------|---|--------|--|--------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.29.002 | Penyusunan standar satuan harga | SKPD | -pedoman penyusunan SSH Tahun 2021 - pedoman penyusunan RKA dan DPA SKPD | | | 33 | 212,000,000 | 33 | 175.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.30 | Program Peningkatan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan | % | Berkembangnya system pendukung bagi pengembangan perekonomian daerah | | | 80 | 560.000.000 | 80 | 560.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.30.001 | Koordinasi Pelaksanaan Program dan Pengendalian Pembangunan | % | Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Pembangunan sebagai bahan masukan kebijakan Pimpinan | | | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------------------|---|---------------------------|--|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.30.002 | Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan | % | Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran dan pembangunan sebagai bahan masukan kebijakan pimpinan | | | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.30.003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Perekonomian Daerah | SKPD dan instansi terkait | Kebijakan untuk meningkatkan perekonomian lokal | | | 5 | 45.000.000 | 5 | 45.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.30.004 | Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Inflasi Daerah | % | Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan informasi resmi dari Pemerintah Mengenai harga pokok dan barang komoditas lainnya dan laju inflasi setiap bulan | | | 80 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | Setda |
| | | 4.00.01.4.00.01.01.30.005 | Fasilitasi, Koordinasi dan | % | Peningkatan Pengelolaan BUMD | | | 70 | 185.000.000 | 70 | 185.000.000 | Setda |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Satuan | Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------|--------------------------------------|--------|---|--------------|------|---|-----|--------|-----|-----------------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Monitoring Investasi Daerah dan BUMD | | | | | | | | | |

Tabel 6.2 (T-C 27b)
Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekterariat Daerah Tahun 2021-2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---|---------------------------------|------|----------------------|---------------|---|--------|---|----|--------|----|--------|----|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih | | | | | - Peningkatan Nilai EKPPD Kota | Nilai | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | |
| | | | | | - Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 0,68 | | 0,05 | | 0,50 | |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | | | | Presentase dan fasilitasi pelayanan tugas KDH dan WKDH | % | 100% | | 100% | | 100% | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|---------|---|---------------|---|------------------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | | | | Presentase administrasi perkantoran yang berkualitas | % | 100% | | 100% | | 100% | |
| | Meningkatnya Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | Nilai rata-rata Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daeah | poin | 25 | | 27 | | 30 | |
| | | 4:01:01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Perangkat Daerah Yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Menenuhi Aspek Penilaian - Persentase Layanan Keprotokolan; - Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu; | % % % % | 80 30 100 100 | 37,040,671,775 | 80 40 100 100 | 37,966,688,569 | 80 50 100 100 | 38,293,202,091 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|-----------------|--|---|---|---------------|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 4 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Berkualitas dan Tepat Waktu; | % | 100 | 279,920,000 | 100 | 315,000,000 | 100 | 345,000,000 |
| | | 4 01 01 2.01 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia - Jumlah Pelaksanaan FGD Penyusunan Renja | jenis kali | 4 1 | 100,000,000 | 2 1 | 115,000,000 | 2 1 | 125,000,000 |
| | | 4 01 01 2.01 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersedia | jenis | 3 | 125.500.000 | 3 | 140,000,000 | 3 | 150,000,000 |
| | | 4 01 01 2.01 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen SPIP dan Mitigasi Risiko | Dok | 2 | 54,420,000 | 2 | 60,000,000 | 2 | 70,000,000 |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 4 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | % | 100 | 17,941,003,821 | 100 | 17,805,207,780 | 100 | 17,821,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------|-----------------|----------------------|---|---|--------|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | 4 01 01 2.02 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN | bulan | 14 | 17,931,434,821 | 14 | 17,791,707,780 | 14 | 17,805,000,000 |
| | | 4 01 01 2.02 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | buku | 4 | 2,695,000 | 4 | 3,500,000 | 4 | 4,000,000 |
| | | 4 01 01 2.02 07 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran | buku | 4 | 3,437,000 | 4 | 5,000,000 | 4 | 6,000,000 |
| | | 4 01 01 2.02 08 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | buku | 4 | 3,437,000 | 4 | 5,000,000 | 4 | 6,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|-----------------|--|---|---|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 4 01 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | % | 100 | 121,094,000 | 100 | 130,000,000 | 100 | 136,000,000 |
| | | 4 01 01 2.03 05 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah rekonsiliasi dan laporan semesteran setda yang tersusun | jenis | 3 | 121,094,000 | 3 | 130,000,000 | 3 | 136,000,000 |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 4 01 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Presentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian sekretariat daerah | % | 100 | 103,040,000 | 100 | 76,625,000 | 100 | 84,500,000 |
| | | 4 01 01 2.05 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terlaksana | bulan | 12 | 7,540,000 | 12 | 14,300,000 | 12 | 16,500,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|---|--------------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | 4 01 01 2.05 04 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Aplikasi dan pemeliharaan Dawai Sakti yang terintegrasi | Buah / bulan | 1 Buah | 49,500,000 | 12 bulan | 1,425,000 | 12 bulan | 5,000,000 |
| | | 4 01 01 2.05 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah sosialisasi dan Pelatihan Formal yang terlaksana | orang | 50 | 46,000,000 | 50 | 60,900,000 | 50 | 63,000,000 |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 3.133.726,200 | 100 | 3,285,000,000 | 100 | 3,354,500,000 |
| | | 4 01 01 2.06 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik yang terpenuhi | jenis | 10 | 42,750,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 57,500,000 |
| | | 4 01 01 2.06 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi | jenis | 38 | 129,500,000 | 38 | 155,000,000 | 38 | 160,000,000 |
| | | 4 01 01 2.06 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah tersedianya peralatan kebersihan kantor | jenis | 30 | 112,248,000 | 30 | 125,000,000 | 30 | 130,000,000 |
| | | 4 01 01 2.06 05 | | Penyediaan Barang Cetak dan | Jumlah kebutuhan amplop, blanko spped, dan map yang terpenuhi | jenis | 20 | 241,878,500 | 20 | 250,000,000 | 20 | 257,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|--|--|---|--------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | | | Penggandaan | | | | | | | | |
| | | 4 01 01 2.06 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kebutuhan Surat Kabar Harian, mingguan/bulanan yang tersedia | bulan | 12 | 524,999,700 | 12 | 560,000,000 | 12 | 575,000,000 |
| | | 4 01 01 2.06 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kebutuhan makanan, minuman dan cindramata yang terpenuhi | bulan | 12 | 1,450,000,000 | 12 | 1,475,000,000 | 12 | 1,500,000,000 |
| | | 4 01 01 2.06 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang terlaksana | Bulan | 12 | 632,350,000 | 12 | 670,000,000 | 12 | 675,000,000 |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah | % | 100 | 775,935,000 | 100 | 815,000,000 | 100 | 825,000,000 |
| | | 4 01 01 2.07 05 | | Pengadaan Mebel | Jumlah meubel yang tersedia | Jenis | 4 | 132,500,000 | 4 | 145,000,000 | 4 | 150,000,000 |
| | | 4 01 01 2.07 11 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah alat kantor dan rumah tangga yang tersedia | Jenis | 18 | 643,435,000 | 18 | 670,000,000 | 18 | 675,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|--|---|---|--------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100 | 4,386,253,000 | 100 | 4,497,875,000 | 100 | 4,535,000,000 |
| | | 4 01 01 2.08 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah perangka, materai dan kebutuhan surat menyurat yang terpenuhi | Bulan | 12 | 28,000,000 | 12 | 67,875,000 | 12 | 70,000,000 |
| | | 4 01 01 2.08 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan telepon, air, dan listrik yang terpenuhi | bulan | 12 | 498,000,000 | 12 | 520,000,000 | 12 | 525,000,000 |
| | | 4 01 01 2.08 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kebutuhan sewa perlengkapan yang terpenuhi | jenis | 20 | 709,423,000 | 20 | 735,000,000 | 20 | 740,000,000 |
| | | 4 01 01 2.08 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kebutuhan honor Non PNS, Petugas Kebersihan, dan Petugas Keamanan yang terpenuhi | Bulan | 12 | 3,150,830,000 | 12 | 3,175,000,000 | 12 | 3,200,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|---|--|--|--------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | 4 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah | % | 100 | 2,001,377,300 | 100 | 2,119,000,000 | 100 | 2,176,000,000 |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.09 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan yang terpenuhi | Jenis | 5 | 99,200,000 | 5 | 130,000,000 | 5 | 140,000,000 |
| | | 4 01 01 2.09 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dan bahan bakar yang terpenuhi | Jenis | 5 | 503,250,000 | 5 | 530,000,000 | 5 | 540,000,000 |
| | | 4 01 01 2.09 05 | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan meja dan kursi kerja yang terpenuhi | Jenis | 2 | 12,240,000 | 2 | 14,000,000 | 2 | 16,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------|-----------------|----------------------|--|--|--------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | 4 01 01 2.09 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah kebutuhan suku cadang perangkat kerja dan Jasa Perbaikan yang terpenuhi | Jenis | 16 | 107,050,000 | 16 | 120,000,000 | 16 | 130,000,000 |
| | | 4 01 01 2.09 07 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah kebutuhan bbm, gas, belanja material dan laundry yang terpenuhi | Jenis | 48 | 224,600,000 | 48 | 233,000,000 | 48 | 240,000,000 |
| | | 4 01 01 2.09 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung yang terpenuhi | unit | 3 | 1,020,354,300 | 3 | 1,050,000,000 | 3 | 1,060,000,000 |
| | | 4 01 01 2.09 10 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan barang elektronik yang terpenuhi | Jenis | 4 | 18,883,000 | 4 | 22,000,000 | 4 | 25,000,000 |
| | | 4 01 01 2.09 11 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga yang terpenuhi | Jenis | 5 | 15,800,000 | 5 | 20,000,000 | 5 | 25,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|---|--|---|--------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Persentase terpenuhinya Gaji Dan Sarana Operasional KDH/WKDH | % | 100 | 1,560,206,954 | 100 | 1,812,499,174 | 100 | 1,824,206,954 |
| | | 4 01 01 2.11 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah pembayaran gaji KDH/WKDH yang terpenuhi | Bulan | 14 | 1,144,206,954 | 14 | 1,144,206,954 | 14 | 1,144,206,954 |
| | | 4 01 01 2.11 02 | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah pengadaan baju dan atribut yang tersedia | Jenis | 10 | 316,000,000 | 10 | 335,000,000 | 10 | 340,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|---|--|---|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | 4 01 01 2.11 03 | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi | Bulan | 12 | 100,000,000 | 12 | 125,000,000 | 12 | 130,000,000 |
| | | 4 01 01 2.11 03 | | Penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH | Jumlah terpenuhinya penunjang operasional KDH/WKDH | Bulan | - | 0 | 12 | 208,292,220 | 12 | 210,000,000 |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | Persentase tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH Dan Lingkup Setda | % | 100 | 553,600,000 | 100 | 595,000,000 | 100 | 605,000,000 |
| | | 4 01 01 2.12 01 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah kebutuhan alat rumah tangga <i>home use</i> , peralatan olahraga, dan peralatan kesenian/budaya yang terpenuhi | Jenis | 10 | 299,100,000 | 10 | 325,000,000 | 10 | 330,000,000 |
| | | 4 01 01 2.12 03 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah kebutuhan jasa kebersihan, peralatan dan keperluan Pimpinan yang terpenuhi | Bulan | 12 | 254,500,000 | 12 | 270,000,000 | 12 | 275,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|-----------------|----------------------|--|--|-------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | 4 01 01 2.13 | Penataan Organisasi | | Presentase ketercapaian kegiatan penataan organisasi | % | 100 | 1,037,361,700 | 100 | 1,125,000,000 | 100 | 1,155,000,000 |
| | Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 4 01 01 2.13 01 | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan, kajian, rancangan peraturan terkait kelembagaan dan analisis jabatan yang terpenuhi - Jumlah rakor/diklat/bimtek/desiminasi terkait kelembagaan/ analisis jabatan yang terlaksana | Jenis Kegiatan | 4 2 | 279,325,800 | 4 2 | 515,000,000 | 4 2 | 520,000,000 |
| | | 4 01 01 2.13 02 | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Buku Laporan/Dokumen terkait layanan publik dan tata laksana yang terpenuhi | Jenis | 4 | 117,642,000 | 4 | 140,000,000 | 4 | 150,000,000 |
| | | 4 01 01 2.13 03 | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah pelaksanaan petihan agen perubahan, penghargaan PeDe Hade dan penyusunan laporan PMPRB | Kegiatan | 3 | 250,000,000 | 3 | 145,000,000 | 3 | 150,000,000 |
| | | 4 01 01 2.13 04 | | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan dan usulan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terpenuhi | Jenis | 4 | 215,620,000 | 4 | 220,000,000 | 4 | 225,000,000 |
| | | 4 01 01 2.13 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja | Jumlah Pelaksanaan Bintek Pengolahan Data LKIP SKPD, pengembangan aplikasi e- | | 3 | 174,773,900 | 3 | 105,000,000 | 3 | 110,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|--|--------|---|------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | | | Pemerintah Daerah | Performance dan penyusunan dokumen Laporan dan perjanjian kinerja yang terpenuhi | Keg | | | | | | |
| | Terpenuhinya pelayanan KDH/WKDH | 4 01 01 2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH | % | 100 | 5,147,153,800 | 100 | 5,390,481,615 | 100 | 5,431,995,137 |
| | | 4 01 01 2.14 01 | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah kebutuhan layanan keprotokolan yang terpenuhi | Bulan | 12 | 3,178,223,800.00 | 12 | 3,240,000,000 | 12 | 3,250,000,000 |
| | | 4 01 01 2.14 02 | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah kebutuhan fasilitasi komunikasi pimpinan yang terpenuhi | Bulan | 12 | 1,150,000,000 | 12 | 1,275,000,000 | 12 | 1,300,000,000 |
| | | 4 01 01 2.14 03 | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah fasilitasi kegiatan peliputan dan kehumasan bagi KDH/WKDH yang terpenuhi | Bulan | 12 | 818,930,000 | 12 | 875,481,615 | 12 | 881,995,137 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---|---|------|----------------------|---------------|--|---------------|---|----|--------------|----|--------------|----|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai keagamaan | | | | | Cakupan Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan | % | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan | | | | Presentase pelaksanaan kegiatan keagamaan | % | 100 | | 100 | | 100 | |
| Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih | | | | | - Peningkatan Nilai EKPPD Kota - Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi | Nilai Poin | 0,02 0,68 | | 0,02 0,05 | | 0,02 0,50 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | | | | Nilai EKPPD Kota | Nilai | 3,44 | | 3,46 | | 3,48 | |
| | Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi | | | | Nilai Rata-rata Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Poin | 25 | | 27 | | 30 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|-----------------|---|------------------------------------|---|----------|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Birokrasi | | | | | | | | | | | |
| | | 4 01 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Persentase Koordinasi Dan Fasilitasi Produk Perundang-Undangan, Bantuan Hukum Dan Ham Serta Dokumentasi Hukum; - Persentase Kegiatan Keagamaan Swadaya Masyarakat | % | 90 | 14,734,980,883 | 90 | 15,376,456,697 | 90 | 15,717,848,119 |
| | | | | | % | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | | | | | % | 80 | 80 | | 80 | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | 4 01 02 2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | Persentase terpenuhinya pelayanan urusan pemerintahan | % | 100 | 2,267,877,400 | 100 | 2,455,000,000 | 100 | 2,510,000,000 |
| | | 4 01 02 2.01 01 | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah fasilitasi penataan administrasi pemerintahan yang terpenuhi | Kegiatan | 4 | 1,094,067,200 | 4 | 1,131,189,800 | 4 | 1,150,000,000 |
| | | 4 01 02 2.01 02 | | Pengelolaan Administrasi | Jumlah fasilitasi pengelolaan administrasi kewilayahan yang | Kegiatan | 13 | 771,028,200 | 13 | 846,028,200 | 13 | 860,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|-----------------|--|---|--|----------|---|--|----------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | | | Kewilayahan | terpenuhi | | | | | | | |
| | | 4 01 02 2.01 03 | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah kegiatan terkait otonomi daerah yang terpenuhi | Kegiatan | 13 | 402,782,000 | 13 | 477,782,000 | 13 | 500,000,000 |
| | Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan | 4 01 02 2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase terpenuhinya layanan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat | % | 100 | 10,931,808,726 | 100 | 11,200,000,000 | 100 | 11,353,848,119 |
| | | 4 01 02 2.02 01 | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Cakupan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang terpenuhi | Kegiatan | 16 | 3,932,061,100 | 16 | 4,020,000,000 | 16 | 4,053,848,119 |
| | | 4 01 02 2.02 02 | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Cakupan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi | Kegiatan | 9 | 4,300,000,000 | 9 | 4,380,000,000 | 9 | 4,450,000,000 |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat | Cakupan Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi | kegiatan | 5 | 2.699.747.626 | 5 |
| | Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi | 4 01 02 2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | Persentase terpenuhinya layanan hukum untuk perangkat daerah dan fasilitasi bantuan hukum. | % | 100 | 1,087,000,000 | 100 | 1,221,456,697 | 100 | 1,280,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------------------|---|--|-----------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Birokrasi | 4 01 02 2.03 01 | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen produk hukum yang tersusun - Jumlah sosialisasi/rapat/workshop produk hukum daerah yang terlaksana | jenis kegiatan | 4 2 | 256,000,000 | 4 2 | 303,500,000 | 4 2 | 325,000,000 |
| | | 4 01 02 2.03 02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah fasilitasi bantuan hukum dan HAM yang terpenuhi | kegiatan | 6 | 213,000,000 | 6 | 240,000,000 | 6 | 255,000,000 |
| | | 4 01 02 2.03 03 | | Pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum | Jumlah pelayanan fasilitasi Pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum | kegiatan | 6 | 618,000,000 | 6 | 677,956,697 | 6 | 700,000,000 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | 4 01 02 2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | Persentase Meningkatnya kualitas pelaksanaan kerjasama daerah | | 100 | 448,294,757 | 100 | 500,000,000 | 100 | 574,000,000 |
| | | 4 01 02 2.04 01 | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang terpenuhi | Kegiatan | 10 | 259,294,757 | 10 | 285,000,000 | 10 | 324,000,000 |
| | | 4 01 02 2.04 02 | | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang terpenuhi | Kegiatan | 3 | 84,000,000 | 3 | 100,000,000 | 3 | 125,000,000 |
| | | 4 01 02 2.04 03 | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Buku Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | Buku | 12 | 105,000,000 | 12 | 115,000,000 | 12 | 125,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------------------|---|--|--------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih | | | | | - Peningkatan Nilai EKPPD Kota | Nilai | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | |
| | | | | | - Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 0,68 | | 0,05 | | 0,50 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | | | | Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | % | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | | | | Presentase administrasi perkantoran yang berkualitas | % | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | Nilai Rata-rata Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Poin | 25 | | 27 | | 30 | |
| | | 4 01 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | - Persentase Pengendalian Pelaksanaan Apbd; | % | 100 | 1,309,262,600 | 100 | 1.341.994.165 | 100 | 1,353,535,315 |
| | | | | - Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah; | % | 100 | 100 | | | | | |
| | | | | - Persentase Level Maturitas Pelayanan Pbj | Level | 2 | 2 | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------|---|-----------------|--|---|--|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | 4 01 03 2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | Persentase Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan Pengendalian, BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti. | % | 100 | 420,212,000 | 100 | 430,000,000 | 100 | 436,535,315 |
| | | 4 01 03 2.01 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | - Jumlah laporan/risalah/kajian terkait pengelolaan BUMD dan BLUD yang terpenuhi | Jenis | 2 | 150,212,000 | 2 | 156,000,000 | 2 | 160,000,000 |
| | | | | | - Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ monitoring yang terlaksana | Kegiatan | 2 | | 2 | | 2 | |
| | | 4 01 03 2.01 02 | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Buku Laporan terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang terpenuhi | jenis | 2 | 150,000,000 | 2 | 151,000,000 | 2 | 152,500,000 |
| | 4 01 03 2.01 03 | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah laporan terkait Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jenis | 2 | 120,000,000 | 2 | 123,000,000 | 2 | 124,035,315 | |
| | Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran | 4 01 03 2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | Presentase laporan pengendalian dan evaluasi program pembangunan | % | 100 | 159,000,000 | 100 | 160,000,000 | 100 | 161,000,000 |
| | | 4 01 03 2.02 02 | | Pengendalian dan Evaluasi | - Jumlah laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan APBD | Buku | 125 | 159,000,000 | 125 | 160,000,000 | 125 | 161,000,000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|--|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | | | | - Jumlah rakor pengendalian pembangunan Kota Sukabumi yang terlaksana | Kegiatan | 4 | | 4 | | 4 | |
| | | 4 01 03 2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Presentase pemenuhan layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas | % | 100 | 730,050,600 | 100 | 751,994,165 | 100 | 756,000,000 |
| | Meningkatnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 4 01 03 2.03 01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - Jumlah buku terkait layanan pengadaan barang/jasa yang tersedia | Jenis | 3 | 330.506.000 | 3 | 333,094,165 | 3 | 334,000,000 |
| - Jumlah sosialisasi/publikasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang terlaksana | | | | | kegiatan | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4 01 03 2.03 02 | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik | Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik yang terlaksana | kegiatan | 3 | 221,180,000 | 3 | 230,500,000 | 3 | 232,000,000 | |
| 4 01 03 2.03 03 | | | Pembinaan dan Advokasi | - | Jumlah laporan/kajian terkait pembinaan dan advokasi PBJ yang tersedia | Jenis | 3 | 178,364,600 | 3 | 188,400,000 | 3 | 190,000,000 |
| | Jumlah sosialisasi/FGD terkait pembinaan PBJ yang terlaksana | | | | kegiatan | 3 | 3 | | 3 | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 (T-C.28a)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2020

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | | TARGET | REALISASI | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |
|----|--|--------|---|------|--------|-----------|--------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cakupan Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Peningkatan Nilai EKPPD Kota | Nilai | - | N.A | 0,1 | N.A | 0,2 |
| 4 | Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 0,76 | 0,04 | - | 0,05 | 3,42 |
| 5 | Nilai EKPPD Kota | Persen | 3,39 | - | - | 3,4 | 3,42 |
| 6 | Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | Persen | N.A | N.A | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Presentase fasilitasi dan Pelayanan Tugas KDH/WKDH | Persen | N.A | N.A | - | - | - |
| 8 | Presentase administrasi perkantoran yang berkualitas | Persen | N.A | N.A | - | 100 | 100 |
| 9 | Hasil Rata-rata Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Persen | N.A | N.A | - | - | - |

Tabel 7.2 (T-C.28b)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--------|--------------------------|------|------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cakupan Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Bag. Kesra |
| 2 | Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Bag. Kesra |
| 3 | Peningkatan Nilai EKPPD Kota | Nilai | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Bag. Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian |
| 4 | Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 0,68 | 0,05 | 0,50 | Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
| 5 | Nilai EKPPD Kota | Nilai | 3,44 | 3,46 | 3,48 | Bag. Organisasi, Bag Pemerintahan |
| 6 | Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | Persen | 100 | 100 | 100 | Bag. Perekonomian |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--------|-----|-----|-----|---|
| 7 | Presentase fasilitasi dan Pelayanan Tugas KDH/WKDH | Persen | 100 | 100 | 100 | Bagian Prokopim, Bagian Umum |
| 8 | Presentase administrasi perkantoran yang berkualitas | Persen | 100 | 100 | 100 | Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, |
| 9 | Hasil Rata-rata Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | poin | 25 | 27 | 30 | Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra Perubahan ini akan dijabarkan ke dalam Renja setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Sukabumi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Perubahan perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI